



TSUNAMI OF  
PANDEMIC AND  
REPLICA OF THE  
NOAH'S ARK FOR  
INDONESIAN  
MIGRANT  
WORKERS

# TSUNAMI PANDEMI DAN REPLIKA BAHTERA NUH UNTUK PMI

LESSON LEARN PROJECT PEMULIHAN EKONOMI  
KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN TERDAMPAK COVID-19 DI LOMBOK TIMUR



# TSUNAMI PANDEMI DAN REPLIKA BAHTERA NUH UNTUK PMI

TSUNAMI OF PANDEMIC AND REPLICA  
OF THE NOAH'S ARK FOR  
INDONESIAN MIGRANT WORKERS



# TSUNAMI PANDEMI DAN REPLIKA BAHTERA NUH UNTUK PMI

TSUNAMI OF PANDEMIC AND REPLICA  
OF THE NOAH'S ARK FOR  
INDONESIAN MIGRANT WORKERS

**ROMA HIDAYAT**  
**FIRMAN SIDDIK**  
**FAOZAN**  
**RIDHO**



KONSORSIUM ADVOKASI BURUH MIGRAN INDONESIA-RBA

# **Tsunami Pandemi dan Replika Bahtera Nuh untuk PMI**

*Tsunami of Pandemic and Replica of The Noah's Ark  
for Indonesian Migrant Workers*

## **Penyunting**

Roma Hidayat  
Fatih Kudus Jaelani

## **Penulis**

Roma Hidayat  
Firman Siddik  
Faozan  
Ridho

## **Perwajahan Sampul dan Isi**

Parlan Tjak

## **Foto**

Tim ADBMI

## **Diterbitkan oleh**

ADBMI - RBA

Cetakan Pertama, Januari 2023

166 hlm.; 14 cm x 27 cm

QRCBN:

Dilarang menggandakan sebagian atau keseluruhan  
buku ini kecuali demi kepentingan non-komersial.

SAMPUL DAN ISI BUKU INI SEPENUHNYA  
MENJADI TANGGUNG JAWAB ADBMI

# DAFTAR ISI

Daftar Isi	7
Iftitah	9
Pengantar Penyunting	11
TSUNAMI REPATRIASI PMI	
Gelombang Kepulangan Pekerja Migran	15
Habis Modal Terbitlah Paspor	19
Kapal-Kapal Kecil Pemerintah	21
REPLIKA BAHTERA NUH BERNAMA ADBMI	
Kapal Besar ADBMI Bernama Koperasi 'Bumi Raya'	27
Mengapa PMI dan Keluarganya Membutuhkan Bahtera	31
Pria Idaman untuk Konstruksi Sosial yang Ideal	35
<i>Theory of Change (ToC)</i> Sebagai Sebuah Pendekatan	39
JALUR PELAYARAN SANG NAKHODA	
Jalur Pelayaran Sang Nakhoda	47
SETELAH BAHTERA BERLABUH	
Replika Bahtera Nuh (ADBMI) Telah Sampai di Tujuan	63
Catatan Pelayaran:	
Tantangan, Hambatan, dan Jalan Keluar yang Ditempuh	71
Kemunculan Isu Perlindungan Anak Selama Pelaksanaan Program	77
MENUJU PELABUHAN BARU	

Buah Manis dari Pohon Kebaikan	83
Berkah RBA bagi Pemangku Kebijakan	87
Peta Menuju Pelabuhan Baru	89

## **TSUNAMI OF PANDEMIC AND REPLICA OF THE NOAH'S ARK FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS**

Prologue	93
The Wave Of Migrant Workers Returning	97
Government Small Vessels	99
Adbmi's Large Ship Named 'Bumi Raya' Cooperative	105
Why PMI and Their Families Need Ark	109
Deal Men for Ideal Social Construction	113
Theory of Change (ToC) As An Approach	117
The Captain Shipping Line	123
The Replica of Noah's Ark (ADBMI) Has Arrived	139
Sailing Records: Challenges, Obstacles, and Solutions Taken By The Chaptain	147
Another Sailing Storm and Attempt to Set Course	149
The Emergence of Child Protection Issues During Program Implementantation	153
Sweet Fruit From The Tree of Kindness	159
RBA's Blessing for Policy Stakeholders	163
Map to New Harbor	165



# IFTITAH

**S**ebagian orang Sasak mempercayai bentuk atap lumbung dan atap rumah mereka yang seperti gunung itu terinspirasi dari kisah bahtera Nabi Nuh. Ceritanya, pada masa itu orang kesulitan membangun rumah karena seluruh material yang diperlukan untuk melakukan pembangunan telah musnah oleh *tannur* atau air bah yang memancar dari bumi dan langit. Maka yang tersisa saat itu hanya material perahu. Lalu orang-orang membangun rumah dari material yang ada. Dan cukup membalikkan perahu untuk membuat atap rumah mereka.

Dari cerita itu, suku Sasak cukup percaya diri untuk tinggal dalam bangunan dengan atap rumah yang dipercaya terinspirasi dari bahtera yang mencerminkan mitigasi bencana pertama di dunia. Di mana saja mereka tinggal, daerah pesisir atau pun pegunungan, mereka meyakini akan terhindar dari bencana. Semua itu karena mereka menganggap atap rumah sebagai bagian dari kesiapan untuk menghadapi bencana banjir.

Lombok memang berada dalam zona *ring of fire* bencana. Pulau kecil yang dipenuhi ironi. Padanya menjulang tinggi gunung berapi

tertinggi kedua di Indonesia bernama Rinjani. Pantai pasir putihnya yang eksotis, gili-gili dengan pesona bawah lautnya yang indah dan kantong pengirim Pekerja Migran terbesar di Indonesia. Sebuah pulau dengan potensi luar biasa yang penduduknya miskin-miskin. Geliat pengelolaan wisata belum mampu mengatasi kemiskinan itu. Saat ini yang telah terbukti mengangkat perekonomian masyarakat secara signifikan adalah migrasi menjadi pekerja migran. Dari 10 orang dewasa, 7 di antaranya pernah jadi pekerja migran.

Lalu datang Pandemi Covid-19. Kasus pertama dideteksi pada 2 maret 2020. Selanjutnya, mungkin untuk sebagian kelompok, pandemi Covid-19 adalah gelombang kecil yang tak terasa dari atas kapal pesiar besar mereka. Namun bagi masyarakat Sasak, itu adalah gelombang maha dahsyat. Khususnya untuk komunitas pekerja migran, itu tsunami yang meluluhlantahkan sendi-sendi kehidupan mereka.

Jauh sebelum pandemi, kelompok ini adalah kelompok paling miskin yang rentan; petani tanpa lahan, *women single parent*, pendidikan rendah, bahkan buta angka dan huruf dan tidak memiliki sertifikasi keterampilan apapun. Sedangkan perahu mereka adalah perahu kecil dengan pasak yang kecil. Saat ini mereka membutuhkan bantuan tumpangan untuk bangkit dari tsunami pandemi itu, sebuah bahtera Nuh. Penyelamat.

Buku 'Tsunami Pandemi dan Replika Bahtera Nuh untuk Pekerja Migran Indonesia' ini disarikan dari ratusan dialog, puluhan seri pertemuan, pelatihan, dan seminar yang diselenggarakan ADBMI dalam sebuah proyek penanganan dampak ekonomi Covid-19 di tiga desa Kantong PMI di Kabupaten Lombok Timur. Proyek yang dilaksanakan selama 12 bulan ini merupakan upaya untuk memastikan kelompok pekerja migran dapat selamat dari hantaman tsunami ekonomi akibat pandemi. Hal ini dilakukan melalui

penguatan kapasitas Bumdes dan keluarga PMI.

Buku ini berisi laporan hasil program yang kami sajikan dalam bentuk perumpamaan bahtera Nuh sang penyelamat. Hal ini dilakukan untuk dapat membuat pembaca tidak terfokus pada narasi-narasi laporan program semata, namun juga dapat menikmati realita, inspirasi dan sekelumit pesan-pesan di dalamnya.

Selong, 2 Januari 2023

**Roma Hidayat**

Ketua ADBMI



BAGIAN PERTAMA

**TSUNAMI  
REPATRIASI  
PMI**



# GELOMBANG KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN

ROMA HIDAYAT

*“I felt totally helpless, because more and more people with respiratory symptoms were coming ... It was like a tsunami movie where you see the wave coming and no one is doing anything.”*

*–Margarita Robles, Menteri Pertahanan Spanyol*

**M**emasuki tahun 2021, *lockdown* atau penguncian wilayah berkepanjangan yang terjadi di negara tempat Pekerja Migran Indonesia (PMI) bekerja menyebabkan terjadinya gelombang repatriasi atau pemulangan ke negara asal mereka. Seperti tsunami, puluhan ribu PMI dipulangkan ke negara yang juga tengah berjuang menangani pandemi. Kondisi ini menjadi masalah baru dari sekian banyak persoalan buruh migran di tengah pandemi Covid-19.

BP3MI Mataram mencatat per Januari sampai Juni 2021, terdapat sebanyak 14.975 PMI yang kembali ke NTB. 13.670 di antaranya dipulangkan karena kontrak kerja sudah habis, 6.250 berasal dari Kabupaten Lombok Timur. Jumlah ini merupakan data yang

tercatat. Kita tahu begitu banyak yang ilegal dan tak pernah bisa tercatat di buku lembaga pemerintah yang semestinya fokus mengurus hal ini.

Di masa itu, pemerintah Kabupaten Lombok Timur memberikan pelayanan kepada ribuan PMI yang dipulangkan secara bertahap. Di mulai dengan penjemputan dari bandara, karantina selama dua pekan dan terakhir mengantarkan PMI kembali ke kampung halamannya. Namun perlu dicatat, pelayanan tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Namun di luar kekhawatiran pada PMI yang terjangkit Covid-19, ada kekhawatiran lain yang mestinya harus lebih diperhatikan. Hal itu adalah dampak sosial ekonomi atas gelombang PMI yang sepulangnya ke kampung halaman tak tahu harus melakukan apa untuk dapat membuat asap dapur keluarga tetap mengepul.

Seperti layaknya gelombang yang dinyatakan oleh menteri pertahanan Spanyol Margarita Robles, kelompok PMI merasakan dampak sosial ekonomi yang berlipat ganda di tengah tak ada satu pun pertolongan yang fokus pada permasalahan mereka. Pertama penguncian wilayah di negara penempatan menyebabkan pekerja migran tak bisa bekerja. Sementara keluarga mereka yang berharap hidup dari uang kiriman juga dipersulit oleh kondisi pertumbuhan ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Akibatnya semua itu kian memperparah kemiskinan keluarga.

Di sisi lain, pengembang usaha ekonomi keluarga PMI terkendala oleh perilaku konsumtif, bias gender dan tidak efisien dalam mengelola ekonomi rumah tangga. Ditambah lagi rendahnya pengetahuan dan keterampilan untuk memulai serta mengembangkan bisnis. Hal ini disebabkan juga oleh kurangnya dukungan kelembagaan dan layanan yang dapat menunjang lahir dan berkembangnya bisnis berbasis potensi dalam skala kecil di level



pemerintah desa.

Di masa ini juga, terjadi rekrutmen ilegal besar-besaran. Persoalan ini muncul ke permukaan saat sebuah kecelakaan kapal cepat yang mengangkut pekerja migran ilegal karam di laut Malaysia. Puluhan PMI asal Lombok Timur menjadi korbannya. Kemungkinan terjadinya gelombang masuk dan keluar akibat dampak dari pandemi Covid-19 sangat bisa terjadi. Di sini, sosial ekonomi menjadi satu kata kunci.



# HABIS MODAL TERBITLAH PASPOR

FIRMAN SIDDIK

**G**elombang kepulangan PMI ini menyebabkan terpuruknya ekonomi mereka dan keluarga. Hal ini dirasakan oleh Erni Sosialmi, warga Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Ia merupakan satu dari sekian banyak warga yang mengalami keterpurukan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Suaminya, Rizal Saparwadi adalah PMI yang dipulangkan dari negara tempatnya bekerja. Bertahun-tahun bekerja sebagai buruh migran, Rizal tak bisa melakukan apa-apa di kampung halamannya. Terlebih pandemi Covid-19 membuat ruang geraknya terbatas.

Erni bekerja serabutan demi memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anaknya. Sejak awal Erni memang telah merintis banyak usaha. Apalagi suaminya Rizal Saparwadi selalu merantau untuk mencari nafkah sejak awal mereka menikah. Tak sebulan dua bulan, bahkan bertahun-tahun Rizal bisa meninggalkan Erni.

Di tengah persoalan ekonomi rumah tangga yang kian membesar, Rizal memilih untuk merantau ke Malaysia.

Meninggalkan istri dan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah Taman Kanak-kanak (TK).

Erni atau yang akrab disapa Eneng sebenarnya pernah mencoba peruntungan dengan membuka usaha kecil-kecilan di depan rumahnya. Mereka menjual tusuk sate, batagor, dan cilok dengan bahan dasar bambu. Kini, perlahan usaha itu berjalan dan ia memiliki banyak pelanggan. Namun karena keterbatasan modal dan hasilnya tak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sang suami Rizal akhirnya memilih membuat paspor ke Malaysia.

Usaha kecil menengah Eneng sebenarnya sudah mampu berjalan dengan baik. Permintaan tusuk sate tak pernah berkurang setiap harinya. Produksi rumahannya pun telah mampu memberdayakan ibu-ibu dan pemuda di sekitar rumahnya. Kendati tak seberapa, namun hal itu cukup membantu.

Persoalan yang sama juga dirasakan oleh sebagian besar keluarga pekerja migran di Lombok Timur. Pandemi Covid-19 menuntut mereka untuk bisa bertahan dengan berusaha dan tidak mengandalkan uang kiriman semata. Seperti Eneng, uang kiriman ia tabung. Sebagian ia pergunakan untuk mengembangkan modal usaha kecilnya.

# KAPAL-KAPAL KECIL PEMERINTAH

## BANTUAN LANGSUNG TUNAI

FAUZAN

**P**ada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan adanya *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Virus ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. Virus tersebut menyebar sangat cepat hingga ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Hingga pada tahun 2022, meskipun telah ditemukan vaksin untuk mencegah penyebarannya, namun belum diketahui kapan situasi akan normal kembali.

Di tengah ketidakpastian tersebut, pemerintah Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berupaya memulihkan keadaan ekonomi nasional dan penanganan Covid-19. Salah satunya melalui program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, yaitu Dana Desa (DD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan dana desa tahun 2022, dana desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan

non alam sesuai kewenangan desa.

Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi penanggulangan kemiskinan; pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) untuk mewujudkan ekonomi desa tumbuh merata; serta pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa; pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; pencegahan stunting untuk mewujudkan desa sehat dan sejahtera; serta pengembangan Desa Inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan desa.

Prioritas penggunaan dana desa meliputi mitigasi dan penanganan bencana alam dan penanganan bencana non-alam; dan mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Pada tahun 2022 pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 68 triliun yang diperuntukkan untuk 74.960 desa pada 434 kabupaten/kotamadya di seluruh Indonesia. Total alokasi Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 telah mencapai Rp 468,9 triliun.

Untuk tiga desa wilayah kerja ADBMI bersama RBA seperti Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, dan Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, ada beberapa kebijakan

yang dilakukan dalam penanganan Covid-19.

## BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)

Prioritas utama penggunaan dana desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT Desa. BLT Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa. Pemberian ini bertujuan untuk membantu warga miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19, serta menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria penerima manfaat BLT yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem. Selanjutnya warga kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya baik yang bersumber dari APBD dan atau dari APBN. Lalu ada juga penerima dengan kategori keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan, atau rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia.

BLT menjadi salah satu instrumen yang sangat penting dalam penanganan kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem di desa, dan diharapkan dapat meringankan beban masyarakat desa yang terdampak pandemi Covid-19. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Besaran BLT Desa yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Rp 300 ribu per bulan. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap setiap bulan selama 12 bulan terhitung sejak bulan Januari 2022. BLT Desa tahun 2022

dialokasikan minimal 40 persen dari alokasi dana desa di setiap desa, atau secara nasional alokasi dana desa untuk BLT Desa tahun 2022 adalah minimal sebesar Rp 27,2 triliun.

Pemerintah Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur yang merupakan desa program ADBMI mengalokasikan dana sebesar Rp 554,4 juta untuk BLT Desa. Jumlah bantuan tersebut digelontorkan untuk 154 orang kelompok penerima manfaat dengan masing-masing orang mendapatkan Rp 300 ribu selama 12 bulan.

Adapun penentuan kelompok penerima manfaat dilakukan melalui proses musyawarah dusun (Musdus) di semua wilayah kekadusan yang ada. Selanjutnya semua nama-nama calon penerima manfaat ditetapkan di desa melalui musyawarah desa (Musdes) yang di hadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## PENANGANAN KEADAAN DARURAT COVID-19

Selain BLT, pemerintah Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur juga mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 110,2 juta untuk penanganan keadaan darurat Covid-19 melalui pengadaan pembelian perlengkapan Covid-19 seperti pengadaan masker, Handsanitaizer, ember cuci tangan, alat cek suhu badan, dan rumah isolasi.

Selain itu, pemerintah desa Lepak juga mengalokasikan dana desa untuk program padat karya tunai sebesar Rp 275,4 juta. Program tersebut berupa pembangunan fisik atau infrastruktur terutama pembuatan talud dan rabat, pembukaan jalan usaha tani dan pengerasan jalan antar dusun. Terakhir adalah penanganan stunting yang dialokasikan sebesar Rp 22.770 juta selama dua bulan.



BAGIAN KEDUA

**REPLIKA  
BAHTERA NUH  
BERNAMA ADBMI**



# KAPAL BESAR ADBMI BERNAMA KOPERASI 'BUMI RAYA'

ROMA HIDAYAT

**S**elama 17 tahun mengorganisir komunitas PMI dan keluarganya di Lombok Timur, Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) telah lama melakukan pemberdayaan ekonomi keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) berbasis pengelolaan remiten.

Menghadapi gelombang tsunami pandemi Covid-19 yang berdampak pada sosial ekonomi PMI dan keluarganya, terutama setelah terjadinya repatriasi atau pemulangan PMI, ADBMI menginisiasi program pemberdayaan dengan tujuan memulihkan kembali ekonomi PMI dan keluarganya yang terdampak pandemi Covid-19. Fokus program ADBMI kali ini adalah menangani persoalan sosial ekonomi yang dihadapi PMI dan keluarganya di tengah pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi keluarga PMI Lombok Timur yang kian memburuk diterpa pandemi Covid-19 menjadi perhatian ADBMI. Di mana tidak sedikit PMI yang kesulitan mengirimkan remiten ke keluarganya di kampung halaman. Karena meskipun tidak

dipulangkan dari negara tempatnya bekerja, tidak ada yang bisa dikerjakan di sana. Di sisi lain, PMI yang dipulangkan juga mendapatkan persoalan ekonomi yang lebih berat. Terutama perempuan. Beberapa persoalan di atas membuatnya segera menginisiasi program terbaru. Program itu adalah pengembangan ekonomi kreatif keluarga PMI. Bentuknya berupa pendampingan dan pemberian modal usaha.

Selain membentuk tim pendataan penerima manfaat, ADBMI juga mempersiapkan tim penanganan persoalan pendataan. Hal itu dilakukan guna menerima adanya data penerima yang diragukan atau diprotes warga di lokasi sasaran program.

Sejauh ini ADBMI memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan usaha bisnis sebagai kegiatan fundraising maupun mendampingi komunitas pekerja migran. Bahkan ia memiliki modul sendiri dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pemberdayaan ekonomi.

Pengalaman terbaik ADBMI salah satunya terlihat dari koperasi BUMI RAYA sebagai sumber fundraising yang saat ini sudah memiliki lebih dari 5000 anggota dengan total omzet Rp 14,6 miliar. Selain itu, ada 700 lebih anggota yang telah memiliki usaha baru dengan skala menengah. Koperasi Bumi Raya adalah sebuah kapal besar yang dibangun ADBMI dan telah ditumpangi ribuan PMI dan keluarganya.

Kini, di tengah tsunami pemulangan PMI yang berdampak pada sosial ekonomi komunitas PMI, ADBMI menghadirkan sebuah 'bahtera' yang dapat ditumpangi komunitas PMI dan keluarganya yang tengah terombang-ambing oleh gelombang repatriasi akibat pandemi Covid-19. Bahtera ini diperkuat dengan bantuan dari Responsible Business Alliance (RBA) Foundation.

ADBMI dipandang mampu menyediakan bahtera oleh karena

kapal-kapal besar program yang telah dibangun sebelumnya. Kapal tersebut berupa program 'Perluasan Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Miskin yang Menjadi Buruh Migran di 12 Desa Lingkar Hutan Taman Nasional Rinjani di Kabupaten Lombok Timur melalui Pengembangan Bisnis Pengelolaan Sumber Daya Alam (MCAI, 2016-2017) dengan sasaran program laki-laki sebanyak 360 jiwa dan perempuan sebanyak 840 jiwa.

Kapal besar lainnya yang telah dibangun dan berjalan mengarungi samudera persoalan adalah Pengorganisasian komunitas buruh migran dengan pendekatan laki-laki baru untuk migrasi sehat yang adil gender di Kabupaten Lombok Timur (Oxfam, 2015) dengan sasaran 1.200 Kepala Keluarga. Kapal besar sebelumnya adalah berupa program Penurunan Derajat Kemiskinan dan Peningkatan Ketahanan Ekonomi Komunitas BMI di 10 Desa Pengirim Utama di Kabupaten Lombok Timur (Yayasan TIFA-AusAid, 2014) dengan jumlah sasaran 4.000 kepala keluarga.



# MENGAPA PMI DAN KELUARGANYA MEMBUTUHKAN BAHTERA

ROMA HIDAYAT

**K**apal besar ADBMI bernama koperasi 'Bumi Raya' tak bisa serta merta ditumpangi oleh puluhan ribu PMI dan keluarganya yang tengah terombang-ambing oleh gelombang tsunami pandemi Covid-19. Sebab 'Bumi Raya' yang anggotanya adalah keluarga PMI dan purna PMI ini juga digoyahkan oleh gelombang yang sama. Karena itu, dibutuhkan sebuah bahtera baru, yang kemudian kami ibaratkan sebagai sebuah replika bahtera Nuh.

Replika bahtera Nuh ini merupakan sebuah program yang bernama **'Inkubasi Bisnis Responsif Gender Untuk Pekerja Migrant Di Daerah Asal'**. Projek ini bertujuan membantu komunitas pekerja migran khususnya kepada perempuan untuk dapat menciptakan kegiatan usaha ekonomi produktif yang responsive gender sebagai alternatif pendapatan keluarga di masa pandemi Covid-19.

Sebagaimana kita tahu, pengembangan usaha ekonomi keluarga pekerja migran terkendala oleh banyak hal. Dari apa yang selama ini kami temukan, hal itu meliputi; perilaku konsumtif, bias gender dan

inefisiensi dalam pengelolaan ekonomi rumah, rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam memulai serta mengembangkan bisnis, dan kurangnya dukungan kelembagaan dan layanan yang dapat menunjang lahir juga berkembangnya bisnis berbasis potensi dalam skala kecil di level desa.

Program ini setidaknya memiliki tiga luaran atau hasil antisipasi meliputi; meningkatnya kemampuan komunitas pekerja migran terdampak pandemi dalam mengelola ekonomi rumah tangga, pengembangan bisnis sehingga lebih produktif, efisien dan adil gender. Dan ketiga adalah pengembangan sistem pendukung yang dapat menunjang pertumbuhan bisnis.

Pelaksanaan pelayaran replika bahter Nuh ADBMI dilaksanakan selama satu tahun. Dengan anggaran dari RBA, ADBMI telah mengembangkan alat dan sistem ukur keberhasilan proyek. Hal itu berupa penyusunan rencana monitoring dan evaluasi, rapor perubahan manajemen keluarga, dan monitoring dan evaluasi berkala dan berjenjang. Dalam pelayaran bahteranya, ADBMI melibatkan mitra seperti Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Desa pelaksanaan proyek ini. Selain itu, ADBMI juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur, juga tentunya kapal besar ADBMI bernama koperasi Bumi Raya.

Menjawab pertanyaan utama dalam judul tulisan di bagian ini, replika bahtera Nuh dibutuhkan dalam proyek inkubasi bisnis responsif gender untuk pekerja migran di daerah asal karena sebagian besar komunitas pekerja migran di Lombok Timur belum mampu mengoptimalkan remiten atau uang hasil kiriman dari luar negeri. Selain remiten, yang belum mampu dioptimalkan PMI dan keluarganya adalah potensi yang ada untuk menciptakan kegiatan usaha ekonomi produktif.



Beberapa hal tersebut disebabkan juga oleh masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan dalam memulai, menjalankan dan mengembangkan bisnis. Tak hanya itu, manajemen rumah tangga keluarga PMI sampai saat ini masih bersifat patriarki yang berpusat pada pria dan belum didukung pengetahuan dan keterampilan mengelola ekonomi rumah tangga yang baik. Karenanya remiten akan habis untuk dikonsumsi alias tidak bisa dijadikan sebagai modal awal membangun usaha produktif.

Meskipun amanat undang-undang Desa membentuk badan usaha milik desa yang diplot sebagai jangkar penggerak kegiatan ekonomi di desa, namun minimnya pengalaman dan pembinaan ke pemerintah desa membuat keberadaan sebagian besar Bumdes di Lotim sulit berkembang. Secara umum, iklim dan dukungan kebijakan yang dapat menunjang lahir dan berkembangnya bisnis berbasis pengelolaan sumber daya alam dalam skala kecil di level desa belum signifikan dampaknya dalam mendorong kelahiran usaha baru di desa.

Dari itulah, secara umum intervensi proyek menysasar pada peningkatan kapasitas manajemen ekonomi keluarga (termasuk memastikan kesetaraan gender), peningkatan kapasitas pengembangan bisnis dan mendorong perubahan kebijakan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bisnis baru, dan meningkatkan kapasitas dan peran Bumdes sebagai penerima mandat undang-undang desa di bidang ekonomi.

## PENUMPANG REPLIKA BAHTERA NUH

Total penerima manfaat secara langsung proyek ini sebanyak 1.095 orang, terdiri dari 399 perempuan dewasa, 596 anak-anak di bawah usia 18 tahun, dan 100 pria dewasa. Sedangkan penerima

manfaat tidak langsung lebih dari 4000 jiwa. Angka ini merupakan akumulasi dari perkiraan terhadap mereka yang mendapatkan manfaat dari proyek dari kegiatan-kegiatan penyebaran informasi. Mulai dari yang menerima brosur, diskusi dengan penerima manfaat langsung, interaksi dalam aktivitas ekonomi di dalam dan luar desa proyek, para pemangku kepentingan di level desa dan kabupaten.

# PRIA IDAMAN UNTUK KONSTRUKSI SOSIAL YANG IDEAL

## PENDEKATAN LAKI-LAKI BARU DALAM PROMOSI GEDSI

ROMA HIDAYAT

**A**dalah hal biasa jika seorang aparat penegak hukum seperti polisi berbicara tentang bagaimana memberantas kejahatan. Namun bagaimana jika seorang pelanggar hukum yang angkat bicara tentang bagaimana cara memberantas kejahatan? Membumihanguskan perbuatan mereka sendiri? Ini menarik. Sebab siapa lagi yang paling menguasai masalah, medan dan cara untuk mengatasi persoalan kejahatan jika bukan mereka?

Dari pertanyaan itulah ide 'laki-laki baru' terlahir. Bagaimana jika para pelaku kejahatan ketidaksetaraan gender dalam konstruksi budaya kita yang patriarkal didominasi oleh kaum laki-laki tidak hanya membahas caranya memberantas kejahatan gender namun langsung turun tangan menjadi yang terdepan mengatasi kejahatan yang kerap dituding merupakan perbuatan kaum laki-laki itu.

Ide memanfaatkan 'penjahat' sebagai tokoh utama dalam perubahan ini muncul karena secara nasional, gerakan gender dan

Hak Asasi Perempuan di Indonesia didominasi oleh kaum Perempuan dengan strategi 'perempuan bangkit melawan ketidakadilan dan diskriminasi'. Hal ini menyebabkan timbulnya bias persepsi dan sikap resistensi dari beberapa kalangan.

Resistensi tersebut kerap terjadi di desa terpencil. Persepsinya adalah gender mainstreaming itu gerakan perempuan melawan laki-laki. Gender itu isu milik perempuan, isu produk barat yang ingin merusak perempuan. Merusak struktur budaya dan agama. Jadi gerakan ini ada dan penting untuk ada, sebagai pelengkap, penutup celah yang timbul oleh pendekatan-pendekatan yang sudah ada.

Gender adalah gerakan milik perempuan, front yang berhadapan langsung dengan laki-laki. Dalam rapat-rapat di kantor pemerintahan, tak jarang kita mendengar sebuah perkataan berbunyi 'representasi gender tidak ada, atau yang gender-gender duduk di depan'. Ternyata yang dimaksud adalah perwakilan perempuan. Maka ternyata ini masalahnya. Pemahaman tentang gender itu sendiri. Bahkan aparat pemerintahan juga masih salah persepsi tentang gender.

Oleh karena adanya hambatan sosial berupa persepsi negatif, laki-laki baru tidak menginduksikan konsep gender dengan tidak menekankan pada dikenalnya gender sebagai sebuah istilah asing. Terminologi ini tidak perlu dikenal, ia lebih bermanfaat jika dihayati dan dilakukan. Lantas bagaimana para 'penjahat gender' atau pria-pria ini mau terlibat aktif dalam gerakan tersebut? Maka perlu meyakinkan para pria tentang keuntungan yang mereka akan kantong.

Tantangan atau ketakutan lelaki setelah memahami konsep setara gender adalah ia akan mengalami kerugian berupa diperotolnya beberapa 'privilege tradisionalnya'. Maka sangat penting untuk memaparkan data riset dan hasil observasi kita tentang keuntungan

setara gender bagi kehidupan mereka. Misalnya keuntungan sebagai mahluk biologis dan sosiologis (dampak positif untuk kesehatan fisik dan psikologi), jaminan hari tua karena adanya perbaikan relasi yang makin kuat karena terlibat dalam *parenthood* anak, berkurangnya stress, dan relasi lainnya dalam rumah tangga.

Mainstreaming gender lebih banyak dilakukan dengan pendekatan konsep dan 'pemaksaan' melalui ancaman dan bahkan tindakan hukum positif yang berlaku bagi para pelanggar. Advokasi terkait hal ini rata-rata bertujuan melahirkan berbagai regulasi. Maka dalam hal ini, dibutuhkan pendekatan manfaat dan kerugian (*insentive approach*) dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menemukan dan membuktikan sendiri nikmatnya melakoni kesetaraan gender.

Hal ini dapat dikatakan juga sebagai *mainstreaming gender* dengan pendekatan konsep menempatkan aktivis, donor, pemerintah dan pihak *outsider* selain komunitas menjadi pemuka gerakan dan masyarakat sebagai objek atau target kelompok yang akan dicerahkan.

Sementara dengan pendekatan baru ini, masyarakat sendiri yang menjadi aktor utamanya. Dalam pendekatan yang baru ini, masyarakat secara langsung diarahkan untuk membuktikan sendiri dalam kehidupan nyata di lingkungan mereka, bagaimana perbedaan hidup mereka yang telah setara gender dan yang tidak. Masyarakat diminta untuk menemukan model ala komunitasnya sendiri. Menemukan dan menentukan praktik terbaik di lingkungan mereka masing-masing.

Salah satu cara efektif untuk mempromosikan 'laki-laki baru' dalam pengalaman ADBMI adalah menyelenggarakan kompetisi pria idaman. Hasilnya adalah 'matahari kembar laki-laki baru'.



# ***THEORY OF CHANGE (TOC)*** **SEBAGAI SEBUAH PENDEKATAN**

ROMA HIDAYAT

**P**ekerja migran dan keluarganya merupakan salah satu komunitas yang paling terdampak oleh bencana non alam pandemi Covid-19. Bencana ini meruntuhkan sumber penghasilan utama keluarga di mana mereka harus menghadapi pembatasan ketat di negara tempat mereka bekerja, samapi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melahirkan tsunami repatriasi atau pemulangan pekerja migran. Persoalan ini berakibat pada hilangnya pendapatan keluarga mereka di negara asal yang sumber utamanya berasal dari kiriman atau remiten.

Di sisi lain keluarga yang ditinggalkan mengalami masalah yang sama. Kebijakan *lockdown* atau pembatasan wilayah telah menghantam sektor wisata yang selama ini menjadi salah andalan di pulau Lombok. Kunjungan wisatawan yang merosot tajam membuat para pelaku usaha pariwisata mati suri. Begitu juga kebijakan pembatasan aktivitas sosial secara langsung berpengaruh kepada masyarakat kecil yang hanya memiliki penghasilan berbasis kerja harian. Jika tidak bekerja atau beraktivitas hari itu, maka tidak ada pemasukan keluarga.

Fakta tersebut menyebabkan komunitas ini sangat rentan jatuh ke dalam jurang kemiskinan sehingga ketahanan mereka terhadap dampak bencana menjadi sangat rendah. Oleh karena itu, melalui program RBA ini Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI) merancang suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi komunitas pekerja migran dalam menghadapi dampak bencana Pandemi Covid-19.

*Theory of Change* (ToC) atau teori perubahan yang kami jadikan sebagai pendekatan dalam program ini adalah 'jika komunitas pekerja migran diajarkan untuk mendirikan dan menjalankan wirausaha sebagai alternatif sumber penghasilan lain dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat berperan aktif baik sebagai mitra maupun pembina kelompok-kelompok wirausaha tersebut, maka ekosistem bisnis akan terbentuk sehingga komunitas pekerja migran dan keluarganya akan tahan secara ekonomi dan mampu beradaptasi dengan dampak pandemi baik Covid-19 ataupun bencana lainnya di masa mendatang.

Secara formulatif, ToC yang kami rancang ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga pekerja migrant (secara khusus, prioritas diberikan kepada perempuan) yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid 19 melalui inkubasi bisnis yang responsive gender sebagai alternatif pendapatan keluarga di masa dan pascapandemi Covid-19.

## POLA MENENTUKAN PENUMPANG 'BAHTERA'

Sebelum replika bahtera Nuh berlabuh, ADBMI terlebih dahulu melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) sebanyak tiga kali di setiap desa program. FGD tahap pertama dilakukan untuk menggali respon dan dukungan pemerintah desa, badan permusyawaratan desa,



lembaga desa dan tokoh lokal terhadap rencana implementasi program. Dalam hal ini, pemerintah desa sangat mendukung kehadiran replika bahtera Nuh. Dukungan tersebut terlihat dari bagaimana pemerintah desa mengkoordinasikan kepala wilayah untuk membantu tim proyek dalam proses pendataan awal.

FGD selanjutnya dilakukan untuk mengidentifikasi tim pendata sebagai mitra dalam pendataan penerima manfaat. Dalam diskusi terarah ini, pengurus BUMDes disepakati dan disetujui sebagai koordinator pendataan. Mereka juga dibantu oleh karang taruna dan kader desa sebagai tim pendataan. Selain itu, pada diskusi terarah tahap pertama ini, ADBMI memberikan pemahaman bersama tentang enam kriteria penerima manfaat atau yang dalam hal ini kita sebut sebagai penumpang replika bahtera Nuh untuk PMI. Pada diskusi terakhir ini, disepakati bersama, tim data mengawali tugasnya dengan mendata sebanyak mungkin calon penumpang.

FGD tahap kedua membahas tentang teknis pendataan yang meliputi konten data, teknis pengisian, teknis wawancara, dan sikap. Salah satu yang disepakati adalah pendataan menggunakan aplikasi *google form* yang telah disiapkan ADBMI. Selanjutnya penyusunan jadwal pendataan dan pembagian tim. Diakhiri dengan simulasi pengisian format data.

Terakhir, FGD tahap ketiga dilakukan setelah pendataan selesai dilaksanakan. FGD ini menghadirkan tim pendataan, kepala wilayah, perwakilan calon penerima manfaat, dan pemerintah desa. Fokus dalam FGD adalah melakukan verifikasi dan validasi data bersama dengan tim pendataan, kepala wilayah, pemerintah desa, dan pendamping desa. Setelah itu FGD juga membahas penanganan pengaduan dan masalah yang berperan dalam memberikan informasi, menangani pengaduan, memfasilitasi penyelesaian perselisihan dan ketidakpuasan masyarakat.

Dari hasil diskusi dengan pemerintah desa dan tim panitia lokal (BUMDes), kami menyepakati bersama adanya pembatasan survei kepada 200 keluarga PMI di tiga desa program. Dengan begitu total keluarga PMI berjumlah 600 keluarga. Pembatasan ini dilakukan untuk mengefisienkan waktu pelaksanaan karena banyaknya keluarga PMI. Di sisi lain, pembatasan juga dilakukan untuk mengurangi resiko munculnya kesalahpahaman sasaran survey. Di mana kebanyakan mereka memahami setiap keluarga PMI yang didatangi dalam proses pendataan awal sudah pasti mendapat bantuan.

Dari 600 keluarga yang didapatkan di tiga desa, tim melakukan penyaringan menjadi 180 penerima manfaat definitive berdasarkan perangkingan atau skoring kriteria yang telah ditetapkan dalam rencana program. Kriteria ini merujuk pada fakta di lapangan yang disarikan dari informasi kepala wilayah. Dalam proses ini, tim membentuk sebuah tim khusus manajemen komplain yang dipimpin oleh BUMDes dan beranggotakan kepala wilayah dan tokoh masyarakat.

Tim ini bertugas meredam dan menetralsisir potensi komplain dan protes yang mungkin muncul sebagai akibat dari penetapan nama-nama penerima manfaat yang telah ditetapkan. Tim ini diangkat dan dikukuhkan dengan surat keputusan (SK) Kepala Desa. Proses assessment database ini dilakukan secara partisipatif dengan metode *home visit*. Sehingga kondisi nyata dari calon penerima manfaat diketahui secara tepat.

Hasil asesmen dipresentasikan pada forum musyawarah desa yang memungkinkan masyarakat desa dapat mengkritisi dan memberi masukan. Hasil keseluruhan proses tersebut kemudian dipublikasikan dan baru kemudian hasil dari assessment ditetapkan sebagai database penerima manfaat desa.

Adapun komposisi penerima manfaat tersebut berdasarkan kriteria yang ditetapkan adalah 55 PMI gagal berangkat, 3 keluarga PMI, 33 PMI Perempuan Kepala Keluarga, 12 orang lanjut usia/tanggungan penyandang disabilitas, 165 migran repatriasi atau pemulangan yang terdiri dari 69 persen perempuan dan 31 persen laki-laki.



BAGIAN KETIGA

**JALUR  
PELAYARAN  
SANG NAKHODA**



# **JALUR PELAYARAN SANG NAKHODA**

## **MENGUMUMKAN PELAYARAN PADA PEMANGKU KEBIJAKAN**

SETELAH penumpang telah terseleksi dan bahtera siap berlayar, proyek penyelamatan ini kami umumkan kepada pemangku kebijakan melalui kegiatan seminar. Seminar dilaksanakan di tingkat kabupaten bekerjasama dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Kajian Percepatan Pembangunan Kabupaten (TKPP).

Dalam seminar, kami menyebarluaskan rencana implementasi program untuk memperoleh respon dari para pihak, dan mengidentifikasi mitra pendukung implementasi program. Pengumuman pelayaran tersebut dihadiri oleh 161 orang dari unsur pemerintah, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, organisasi perempuan, pelaku ekonomi, pemerintah desa, pelaku wisata, dan pegiat desa wisata.

Perwakilan OPD yang hadir merupakan OPD yang memiliki relevansi dengan pemerintahan desa, pemberdayaan sosial dan

ekonomi (UMKM dan IMKM). OPD tersebut adalah Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Dinas DP3AKB, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas pariwisata, dan Dinas Pertanian. Ada juga lembaga pemerintahan daerah dari unsur organisasi masyarakat pemerhati kebijakan pembangunan, pelaku pemberdayaan ekonomi, pelaku advokasi, pendamping desa dan kader pemberdayaan masyarakat.

Sementara dari unsur pelaku usaha hadir Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), biro perjalanan wisata, kelompok sadar wisata, pelaku wisata, organisasi mahasiswa, pemerintah desa, relawan dan pegiat pembangunan desa.

Dalam seminar tersebut, kami mengidentifikasi beberapa hasil. Pertama, kami menemukan OPD teknis yang relevan dalam membantu pelayaran replika bahtera Nuh, yaitu dinas PMD, dinas sosial, dinas koperasi dan UMKM, dan DP3AKB. Kedua, dukungan OPD terhadap rencana implementasi program dalam bentuk integrasi data, penguatan kapasitas BUMDes dan pemerintah desa, dan akses untuk koordinasi hasil, tantangan implementasi program, juga potensi dukungan kebijakan.

## **ROADSHOW KE STAKEHOLDER TERPILIH**

LANGKAH lain yang dilakukan ADBMI dalam mengumumkan pelayaran program adalah melakukan roadshow ke stakeholder terpilih. Aktivitas ini dilaksanakan untuk mengkomunikasikan hasil pendataan kelompok sasaran, jenis usaha, kendala dan kebutuhan khususnya terkait dampak bencana Covid-19.

Pemangku kepentingan terpilih sebanyak 20 institusi yang terbagi dalam tujuh unsur. Pertama, unsur pemerintah daerah yang terdiri dari Dinas PMD, Dinas Koperasi, Dinas Perdagangan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kedua unsur pemerintah



desa dari tiga desa lokasi program, ketiga unsur lembaga pendukung pemerintah daerah yakni Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD).

Selanjutnya yang ke empat adalah unsur organisasi sipil berupa fasilitator desa, organisasi difabel, karang taruna, jaringan perempuan pengusaha kecil (Jarpuk), dan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal Lombok Timur. Ke lima merupakan unsur pelaku usaha yang dalam hal ini melibatkan Bhineka and Aronawa Company dan pelaku usaha lokal. Ke enam unsur sektor pembiayaan atau pendanaan yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank NTB Syariah. Terakhir adalah perguruan tinggi dalam hal ini kami melibatkan Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Gunung Rinjani (UGR).

Roadshow dilaksanakan dalam bentuk kunjungan langsung kantor instansi terkait, kunjungan rumah, diskusi publik, sarasehan, dan diskusi online. Pertemuan dilaksanakan pada 16 sampai 18 Februari, dan 26 Februari. Kunjungan ini dilanjutkan pada 11 sampai 12 April, dan 15 dan 17 April 2022.

Upaya ini membuahkan beberapa hasil. *Pertama*, terjadi dua perjanjian kesepakatan kerjasama yaitu dengan Jaringan Perempuan Pengusaha Kecil (Jarppuk) dalam hal dukungan pelatihan ekonomi kelompok sasaran, dan perjanjian kerjasama dengan PT Aronawa yakni *aronawa.com* sebuah perusahaan digital marketing nasional sebagai penyedia sistem keuangan.

*Kedua*, roadshow melahir komitmen OPD untuk terlibat dalam pelatihan, pembinaan kelembagaan dan integrasi data. *Ketiga*, integrasi program dengan lembaga *ad hoc* pemerintah yakni TKPKD dan TPPD dalam bentuk dukungan memfasilitasi tempat kegiatan, komunikasi dan pertemuan lanjutan, lobi dan hearing dengan

pemerintah daerah. *Keempat* adalah integrasi rencana mitigasi bencana melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) pada tiga desa lokasi program. *Kelima*, Tercipta komitmen kepala desa di tiga lokasi program untuk menguatkan peran BUMDes dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di desa masing-masing.

## **WORKSHOP PENGEMBANGAN MEDIA INFORMASI DAN EDUKASI**

KEGIATAN ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis media yang berpotensi dikembangkan, mengidentifikasi isu-isu penting untuk dipublikasikan menjadi muatan media informasi dan edukasi. Workshop menghadirkan peserta dari unsur pemerintah daerah, media massa lokal, pelaku usaha kreatif, kelompok sosial (BUMDes, tim pendataan, representasi komunitas migran, kelompok difabel, akademisi, LSM, praktisi bisnis, lembaga keuangan, dinas PMD, satgas COVID-19, dinas koperasi dan UMKM, dan asisten I Setda Lombok Timur). Workshop menghasilkan rekomendasi yang terdiri dari; (a) Program harus dapat memanfaatkan media sosial secara bijak dalam mengkomunikasikan isu bencana, konflik dan lingkungan; (b) Penguatan pemahaman (edukasi) isu gender, difabel, dan kelompok rentan sebagai kekuatan, bukan sebagai beban sosial; (c) mendokumentasikan praktek baik penanganan Covid-19 dari prakarsa masyarakat; (d) Sosialisasi isu perubahan iklim untuk kewaspadaan dan tindakan mitigasi; (e) edukasi kritis terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Timur khususnya tiga desa dampingan program.

## **PELATIHAN MANAJEMEN EKONOMI RUMAH TANGGA YANG ADIL GENDER**

Melalui aktivitas ini telah dilatih 180 orang penerima manfaat

yang telah dipetakan pada kegiatan sebelumnya. Pelatihan dilaksanakan di masing-masing desa, difasilitasi oleh JARPUK (Jaringan Perempuan Pengusaha Kecil), Dinas Koperasi dan UMKM, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Kegiatan ini memberikan penerima manfaat pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan di level paling dasar yaitu rumah tangga. Mereka dilatih mencatat pengeluaran dan pemasukan untuk membiasakan mereka tertib dalam membuat administrasi keuangan sederhana. Hal ini dibutuhkan saat mereka menjalankan sebuah usaha sebagai salah satu langkah awal untuk berwirausaha secara professional dan akuntabel.

Dari dokumen post-test pascakegiatan, sebagian besar peserta sudah cukup baik dalam membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Tangga (RAPBRT). Dalam proses tersebut, mereka menyadari pengelolaan keuangan rumah tangga mereka selama ini kurang baik mengingat formulir tersebut menunjukkan masih lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan yang mereka peroleh. Bahkan sebagian besar dari penerima manfaat menyimpulkan bahwa mereka mengalami kerugian dan berakibat pada penimbunan hutang.

Pelatihan ini menunjukkan kepada mereka akan pentingnya manajemen rumah tangga yang baik. Dampak positif ini kemudian tampak dari testimoni yang mereka ungkapkan setelah pelatihan. Selain itu, mereka juga tidak sekedar berlatih mengelola keuangan, tetapi mendapat pengetahuan agar siap siaga terhadap bencana.

Pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas komunitas terhadap bencana yang hampir pasti terjadi. Seiring dengan perubahan sosial ekonomi yang mereka hadapi. Dalam konteks mereka sebagai purna PMI ataupun keluarga PMI, muatan edukasi ini diharapkan membuat peserta mampu menyusun rencana

penggunaan remiten untuk bisnis produktif berupa tabungan. Termasuk untuk kesiapsiagaan keuangan saat bencana.

### **LAYANAN KONSULTASI SETELAH PELATIHAN**

LAYANAN konsultasi dilakukan sebagai bagian dari *after training support*. Kegiatan ini dilakukan sebanyak dua kali terhadap keluarga yang telah mengikuti pelatihan MERT. Teknis pelaksanaan layanan konsultasi dilakukan dengan home visit atau kunjungan rumah.

Sebelum memberikan pelayanan, tim terlebih dahulu menyiapkan isu utama dan daftar pertanyaan pemandu. Selanjutnya mengidentifikasi keluarga yang akan dikunjungi yang dipilih secara acak yang merepresentasikan enam kriteria penerima manfaat. Baru setelah itu dilakukan *indepth approach* atau pendalaman terhadap rumah tangga peserta yang secara signifikan menunjukkan perubahan, dan terhadap keluarga yang belum menunjukkan perubahan.

Dari kunjungan tersebut ditemukan sebanyak 180 orang penerima manfaat program telah difasilitasi dalam merevisi rencana usaha. Terdapat kendala penyusunan pembukuan keuangan rumah tangga. Selanjutnya penerima manfaat difasilitasi dalam membuat NIB untuk penerima manfaat (pelaku UMKM) yang belum terfasilitasi selama pelatihan. Terakhir, rencana pendampingan peserta yang sudah atau sedang menjalankan usahanya.

### **PELATIHAN PEMBUATAN PERENCANAAN BISNIS (KELAYAKAN USAHA)**

KEGIATAN yang masih termaktub dalam bagian pelayanan sang nakhoda ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi peningkatan kapasitas sasaran dalam menyusun rencana usaha yang layak, mengembangkan potensi diri dan lingkungan, melahirkan kerjasama

dan membangun jaringan usaha. Pelatihan menggunakan modul dengan materi utama terdiri dari: (1) Menemukan ide dalam bisnis; (2) Membuat perencanaan bisnis (dengan pendekatan canvassing business); (3) Pengembangan Produk; (4) Manajemen Pengelolaan Keuangan; dan (5) Kelembagaan Usaha dan Legalitas Usaha.

Selain itu ADBMI dan ADBMI memberikan pemahaman analisis Manajemen risiko dalam bisnis sebagai bagian penting dalam kelangsungan usaha agar pelaku usaha mikro memiliki strategi keluar dari tekanan, kelangsungan produksi dan persaingan usaha, termasuk perubahan kebijakan perbankan. Output yang dicapai: a. Masing-masing peserta (180 orang peserta) mampu mengidentifikasi minimal 5 (lima) jenis ide usaha potensial dan memilih satu jenis usaha untuk susun rencana usahanya; b. peserta mampu Menyusun kelayakan usaha bankable (180 kelayakan usaha tersusun); c. Peserta mampu menyusun rencana produksi dan pengembangan produk untuk 1 periode setahun; d. 90% (163 orang) berhasil difasilitasi membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) yang merupakan persyaratan pelaku UMKM. Untuk menyusun rencana usaha yang bankable, format rencana usaha berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Bank NTB Syariah, dan selanjutnya kelayakan usaha diverifikasi oleh pihak bank dengan tujuan agar memenuhi kelayakan jika pelaku usaha ingin mengajukan permohonan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

## **PELATIHAN TEKNIS PENGOLAHAN SESUAI KEBUTUHAN DAN POTENSI PENDUKUNG**

PELATIHAN bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk sesuai standar kesehatan dan keamanan produk (untuk produk pangan), meningkatkan nilai tambah (added value), dan mampu melakukan produksi sesuai kebutuhan pasar. Kelompok pelatihan

berdasarkan kluster usaha, yaitu: (1) Pelaku usaha kuliner (produk makanan dan minuman olahan) dengan materi: Pemanfaatan produk hasil laut dan hasil pertanian, Penyajian dan pengemasan, keamanan pangan, Pasar dan strategi pemasaran.

Dalam pelatihan ini melibatkan pelaku usaha kuliner, Dinas Perdagangan, dan Dinas Kesehatan. (2) Pelaku usaha jasa, dengan materi pelatihan yaitu: survey pasar dan kecenderungan konsumen, kualitas pelayanan, pengenalan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selain fasilitator pelatihan, terlibat narasumber dari unsur pelaku pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian.

Hasil pelatihan ini yaitu: a. Peserta memiliki rencana pengembangan produksi berbasis potensi local (aneka jenis hasil laut dan hasil pertanian); b. Peserta mengetahui jenis kebutuhan dan standar kualitas kebutuhan sector pariwisata yang dapat dikerjasamakan dengan masyarakat seperti jasa laundry, chatering, dan menu desert seperti aneka buah-buahan; c. mengetahui standar keamanan produk pangan termasuk standar halal, jenis kemasan dan teknis pengemasan.

### **TRAINING OF FASILITATOR (TOF) KOMUNITAS UNTUK PENGURUS BUMDES YANG MENGUTAMAKAN PENGUATAN MATERI PENCEGAHAN COVID-19**

PELATIHAN ini bertujuan untuk memberikan keterampilan memfasilitasi kepada 15 orang pengurus BUMDES (5 orang masing-masing BUMDes) dengan tujuan untuk membentuk fasilitator tingkat masyarakat (fasilitator komunitas) dan menyiapkan fasilitator proses perencanaan pembangunan di desa (merespon kebutuhan pemerintah desa). Materi dalam pelatihan ini yaitu: Teknis komunikasi, pengelolaan pelatihan (kurikulum dan sumber belajar), teknis fasilitasi, menyusun kebutuhan belajar/pelatihan, dan

pengendalian kelas (bina suasana, energizer dan pengendalian proses). Hasil pelatihan yaitu: a. Peserta menguasai (mampu mempraktekkan) teknis komunikasi di depan kelas sebagai fasilitator; b. Mampu Menyusun desain pelatihan (materi, waktu, peralatan, proses, teknis/langkah fasilitasi) untuk mendukung proses dan hasil belajar; c. Peserta mampu mempraktekkan beberapa jenis energizer dan bina suasana sesuai situasi belajar.

Selain itu, dengan memahami tentang teknis andragogi atau Pembelajaran Belajar Orang Dewasa (PBOD) peserta TOF memiliki motivasi diri untuk mengembangkan berbagai teknis komunikasi, memahami kendala dalam memfasilitasi dan strategi penyelesaiannya. Training dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan Fasilitator utama pelatihan yaitu tim dari JARPPUK.

## **PELATIHAN PEMANFAATAN INTERNET UNTUK MENUNJANG PENGEMBANGAN EKONOMI BISNIS**

PELATIHAN ini bertujuan untuk memberikan keterampilan memfasilitasi kepada 15 orang pengurus BUMDes (5 orang masing-masing BUMDes), bertujuan untuk memberikan kesadaran dan keterampilan pemanfaatan internet secara bijak dan produktif khususnya untuk promosi, pemasaran, dan pengembangan jaringan usaha.

Materi dalam pelatihan ini meliputi pengenalan provider penyedia layanan promosi dan pemasaran, pengenalan aplikasi berbasis internet untuk PC dan android, pengelolaan dan pemanfaatan aplikasi, dan strategi promosi dan pemasaran berbasis internet. Hasil pelatihan (output): a. Terinstal aplikasi pemasaran dan keuangan pada laptop dan android peserta (pengurus BUMDes), b. Peserta pelatihan mampu membuat konten pemasaran dan promosi untuk diposting pada media social (facebook, twitter,

instagram) sebagai strategi pemasaran. Fasilitator utama pelatihan ini adalah manajemen PT Aronawa selaku provider dan media consulting multimedia nasional.

### **SERI WORKSHOP PENGUATAN PERAN BUMDES**

BERTUJUAN untuk menguatkan peran BUMDes dalam pengembangan sebagai lembaga ekonomi milik desa, mendorong peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan pengembangan masyarakat. Dilaksanakan sebanyak 5 kali kegiatan. *Pertama* asistensi teknis advokasi BUMDes. Dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDes tentang langkah advokasi untuk pengembangan BUMDes mencakup akses keuangan pemerintah desa, akses kerjasama dan jaringan dengan pihak swasta, dan strategi advokasi masyarakat oleh BUMDes. *Kedua*, Workshop integrasi Keadilan Gender dan Inklusi Sosial (GESI) dalam pembangunan. Workshop mendorong peningkatan partisipasi dan peran yang setara antara laki-laki dan perempuan di desa. Seringkali pelibatan perempuan pada peran pinggir dan pelengkap. Perubahan yang diharapkan adalah terakomodasinya suara perempuan, kebutuhan disabilitas dan kelompok rentan dalam aspek perencanaan dan penganggaran. Termasuk dalam setiap kejadian bencana dan krisis, perempuan, anak-anak, jompo dan disabilitas sering menjadi korban lebih tinggi. Oleh karenanya terkait kesiap siagaan, Desa harus dapat mengadopsi SOP penanganan bencana yang berpihak pada kelompok rentan tersebut.

Selanjutnya yang *ketiga* adalah sarasehan pengembangan kapasitas monitoring dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Sembalun, Lombok Timur dalam rangka menguatkan peran pengurus dalam melakukan monitoring, evaluasi terhadap kelompok penerima manfaat baik dalam pemanfaatan bantuan



modal maupun pengembangan usahanya. *Keempat*, diskusi berbagi pengalaman dan integrasi pendampingan rogram pendampingan. Kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah tempat (lesehan, rumah makan, dan tempat public) bersama LSM lokal, pemerhati sosial dan pembangunan daerah. *Kelima*, lobi dan hearing ke stakeholder dalam rangka pengembangan hasil pelatihan terhadap penerima manfaat.

Aktifitas ini mendapat respon positif dari stakeholder, termasuk dalam bentuk rencana beberapa Dinas di Kabupaten Lombok Timur untuk mengintegrasikan program berbasis data yang dihasilkan oleh BUMDes. Dan *kelima*, pengembangan kapasitas pengurus BUMDes menyambut era 5.0, bertujuan menambah pengetahuan pengurus BUMDes mengenai pengelolaan bisnis digital. Diharapkan peserta termotivasi melakukan perencanaan bisnis berbasis digital dan mengenal berbagai bentuk dan fungsi platform digital. Pelatihan ini membantu pengurus BUMDes dalam mempersiapkan diri menghadapi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terus berkembang.

## **WORKSHOP PENYUSUNAN ROADMAP PENGEMBANGAN BISNIS BUMDES**

KEGIATAN ini dilaksanakan sebanyak dua kali. Workshop pertama tentang teknis penyusunan draf roadmap pengembangan BUMDes dan rencana kerja tahunan BUMDes. *Kedua* workshop pembahasan draft final roadmap pengembangan bisnis BUMDes. Peserta BUMDes terdiri dari 5 orang pengurus BUMDes, pendamping desa, pengawas Bumdes mewakili pemerintahan desa.

Pada workshop pertama diawali dengan bedah Perpres Nomor 4 tahun 2021 tentang BUMDes dan BUMDes bersama antar desa. Teknis penyusunan roadmap dan rencana kerja tahunan, analisis SWOT, identifikasi potensi dan kendala, serta menyusun draf awal

roadmap.

Sementara pada workshop kedua dilakukan review progress penyusunan draf, pembahasan draf roadmap dan rencana kerja. Kemudian dilanjutkan dengan finalisasi. Mengawali roadmap, BUMDes Anjani dan BUMDes Wanasaba dimulai dari membangun kepercayaan BUMDes terhadap pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena BUMDes masih vakum dengan pengurus yang tidak aktif sebelumnya.

Sedangkan BUMDes Anjani diawali dengan penataan usaha BUMDes karena secara kelembagaan atau pengurus tidak ada permasalahan yang signifikan. Dengan demikian BUMDes tinggal melanjutkan usaha yang sudah berkembang, mengembangkan unit usaha dan melakukan pertanggungjawaban pengurus. Setelah terusun kepengurusan tetap, BUMDes Wanasaba dan Anjani kemudian mengaktifkan kembali usaha yang sudah berjalan sebelumnya. Hal itu dilanjutkan pengembangan usaha dengan menyiapkan rencana strategis seperti membuka jenis usaha baru.

Workshop dilanjutkan dengan seminar dan publikasi roadmap BUMDes tiga desa program. Seminar dihadiri oleh unsur pemerintah daerah kabupaten, GOW, perwakilan penyandang disabilitas, pemerhati pembangunan desa dan pemerintah desa masing-masing desa lokasi program. Selain itu hadir juga pemerintah daerah diwakili Dinas PMD Kabupaten Lombok Timur, BAPPEDA dan pelaku usaha bertindak sebagai pembahas roadmap.

Sedangkan Dinas Sosial, GOW, Dinas Koperasi dan UMKM bertindak sebagai pembanding. Sejumlah masukan diberikan oleh pembahas dan pembanding terkait rencana bisnis, kelembagaan/kepengurusan, kapasitas sumber daya manusia, serta peluang dan hambatan. Sementara Dinas Sosial dan Dinas P3AKB Lombok Timur menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dalam

mencegah pekerja anak di kawasan pantai Lepak.

Penyusunan roadmap dinilai mampu memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap BUMDes, diindikasikan dengan adanya komitmen dari masing-masing kepala desa untuk mengalokasikan anggaran penyertaan modal BUMDes pada tahun anggaran 2023, dengan catatan harus dilakukan pergantian dan penguatan pengurus, serta pertanggungjawaban keuangan dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes.

## **PEMBERIAN PAKET BANTUAN MODAL DAN ALAT PRODUKSI**

MODAL produksi telah diberikan kepada semua penerima manfaat dalam bentuk dana yang disalurkan melalui Bank NTB Syariah. Penerima manfaat sudah memiliki rekening dan ATM masing-masing. Selanjutnya BUMDes bersama dengan pemerintah desa melakukan monitoring penggunaan bantuan untuk mendukung usaha yang sudah direncanakan.

Pemberian bantuan pada walnya akan diberikan dalam bentuk barang atau sarana produksi, akan tetapi karena keterbatasan waktu dan beragamnya jenis kebutuhan peralatan yang berpotensi membutuhkan waktu lama untuk pengadaan, maka dipilihlah bantuan tunai.



BAGIAN KEEMPAT

**SETELAH  
BAHTERA  
BERLABUH**



# REPLIKA BAHTERA NUH (ADBMI) TELAH SAMPAI DI TUJUAN

**K**iranya tak terlalu berlebihan jika ADBMI mengibaratkan program ini seperti sebuah replika bahtera Nuh untuk Pekerja Migran Indonesia di tengah gelombang Pandemi Covid-19. Tujuan program pemulihan ekonomi komunitas pekerja migran terdampak Covid-19 di Lombok Timur melalui inkubasi bisnis responsif gender untuk pekerja migran di daerah asal ini telah tercapai.

## MASYARAKAT RENTAN

PROGRAM ini telah mampu membangun kesadaran kritis kelompok masyarakat seperti karang taruna, kader pembangunan desa, dan pengurus BUMDes dalam mitigasi kebencanaan seperti Covid-19 dan krisis global. Penerima manfaat usia muda telah memiliki mental bisnis (kewirausahaan) baru. Hal ini melahirkan pandangan baru terhadap dunia kerja. Di mana mereka tidak harus bekerja di dunia formal, baik pemerintahan dan swasta, atau apalagi menjadi pekerja migran.

Pelaku UMKM meningkatkan kapasitas melalui penguatan

kapasitas teknis seperti pengembangan produk, pengolahan dan pengemasan. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan skala usaha. Pelatihan yang didapatkan juga sangat membantu mereka memahami estetika produk terkait penyajian dan kemasan produk higienis yang menarik konsumen, peningkatan nilai tambah produksi berbasis bahan lokal dan pemanfaatan bahan sisa melalui perubahan bentuk dan sedikit pemberian bahan tambahan. Dan yang terpenting juga, keluarga mampu menyediakan produk pangan yang sehat dan variatif untuk keluarganya.

Melalui penguatan kapasitas manajemen berupa perencanaan, promosi dan pemasaran, pelaku usaha memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan pelaku usaha lain. Termasuk menghadapi persaingan usaha di era digital.

Pelatihan Manajemen MERT, marketing, promosi, pemanfaatan media digital dan lainnya membuat penerima manfaat program memiliki perencanaan usaha yang lebih baik. Mereka juga mampu lebih baik dalam membaca peluang atau potensi pasar, membuat kelayakan usaha, dan membangun kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku usaha yang terlibat dalam pelatihan.

Penerima manfaat juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan manajemen usaha, keterampilan teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk, jaringan kerja dan akses ke stakeholder. Hal ini dikuatkan dengan bantuan modal usaha dan landasan pengetahuan perspektif gender, disabilitas dan inklusi sosial (Geds) di dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga.

Selanjutnya, sebanyak 180 keluarga penerima manfaat telah mampu menyusun dan memiliki dokumen perencanaan ekonomi rumah tangga dalam bentuk form proposal bisnis.



Dalam aspek Gedsi, keluarga penerima manfaat telah mampu menyadari pentingnya penataan musyawarah keluarga dengan melibatkan seluruh anggota keluarga (suami, istri dan anak) dalam suasana demokratis untuk menghasilkan perencanaan yang efektif dan produktif. Terutama untuk menentukan keputusan strategis, seperti jual beli aset keluarga, dan bagaimana remitansi pengeluaran diperoleh dari kiriman keluarga yang bekerja di luar negeri. Mereka juga telah menyadari bahwa ketidakadilan gender dalam keluarga dapat memicu ekonomi yang tidak efektif dan konsumtif.

Selain itu, para penerima manfaat memiliki saluran komunikasi dengan BUMDes, pengelola pemerintah desa yang dapat menjadi jalan bagi mereka untuk terlibat dan dapat mengakses informasi tentang pembangunan yang diselenggarakan oleh desa di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai nasional.

Penerima manfaat sudah melakukan pengenalan bank, literasi bank. Hal itu terwujud dari kepemilikan rekening dan memahami manfaat tabungan keluarga. Sedangkan dari sisi bantuan modal usaha, penerima manfaat langsung memiliki tambahan modal untuk memulai dan meneruskan usaha yang sempat terhenti selama pandemi Covid-19.

Bantuan modal tersebut dipergunakan untuk membeli peralatan baru dan bahan produksi, memperbaiki peralatan, hingga merenovasi tempat usaha. Hal ini sangat dibutuhkan, karena selama usaha tidak berjalan, peralatan sebagian rusak bahkan terpaksa dijual untuk menutupi kerugian. Maka bantuan tersebut mampu menekan biaya perawatan dan sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.

Akibatnya pelaku usaha mikro, baik jasa dan industri kesulitan memulai kembali usahanya. Misalkan untuk yang menjalankan usaha jasa laundry, bantuan modal digunakan untuk membeli kebutuhan seperti sabun, pengharum, plastik kemasan, dan setrika. Dengan begitu, mereka sudah mulai berani menerima order dari

sejumlah hotel dan penginapan di sekitarnya. Setelahnya, mereka juga berani menambah karyawan, sehingga secara perlahan aktifitas ekonomi kembali berjalan.

### **PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

BUMDes sebagai mitra taktis implementasi program mendapatkan sejumlah manfaat yang membawa perubahan signifikan dalam perkembangannya. Pelatihan pengelolaan bisnis yang diberikan kepada pengurus BUMDes melahirkan semangat baru bagi para pengurus di tiga desa program.

Hal ini terlihat dari keaktifan pengurus yang sebelumnya tidak atau kurang semangat memajukan BUMDes. Keaktifan ini terjadi di BUMDes Anjani dan Wanasaba. Sementara di BUMDes Lepak terjadi penambahan pengurus BUMDes.

Program ini memfasilitasi komunikasi BUMDes dengan pemerintah desa yang sebelumnya tidak berjalan dengan baik. Dalam program ini juga, BUMDes didampingi untuk dapat meyakinkan Pemerintah Desa tentang peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan adanya berbagai aktivitas penguatan kapasitas pengurus BUMDes.

BUMDes memiliki sejumlah instrumen seperti dokumen perencanaan bisnis, data pelaku usaha, piranti digital yang dapat dikembangkan untuk kelangsungan BUMDes ke depan. Selain pengurus aktif, BUMDes juga memiliki perencanaan lima tahunan atau roadmap pengembangan BUMDes dan perencanaan bisnis BUMDes. Selain itu, kapasitas para pengurus BUMDes juga meningkat secara signifikan di mana mereka kini memperlihatkan peran sebagai panitia lokal dan fasilitator dalam setiap kegiatan yang melibatkan para penerima manfaat di desa mulai dari tahapan assessment, pelatihan hingga penyaluran bantuan modal.

Setiap keterlibatan aktif mereka dalam tahapan-tahapan tersebut, peran mereka sangat penting dalam menjamin keberlanjutan pendampingan paska program. Di mana mereka sudah mampu mengenal dan memahami baik karakter pribadi maupun usaha para UMKM yang terbentuk dalam kegiatan ini.

Selain itu, program ini juga telah mampu memperbaharui semangat, komitmen dan orientasi eksistensi BUMDES. Hal itu nampak dari upaya melengkapi struktur dan kelengkapan manajerial BUMDes. Pengurus juga telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan berupa teknik fasilitasi komunitas, digital marketing, dan jaringan kerja dengan stakeholders. Dan yang terpenting, pengurus memiliki landasan pengetahuan perspektif Gedsu dalam pendampingan pengembangan bisnis mikro.

Kapasitas tim BUMDes telah meningkat. Kini mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi karena memiliki kemampuan public speaking dan fasilitasi komunitas. Hal tersebut terlihat saat mereka mengadakan pelatihan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Mereka dapat menyampaikan kegiatan dengan sangat baik tanpa kesalahan yang berarti. Mereka tampak sangat termotivasi dan menciptakan beberapa improvisasi yang baik dalam memfasilitasi diskusi.

Selain kapasitas dalam diri pengurus, BUMDes juga memiliki *tool assessment* dan *database* yang dapat digunakan di masa depan untuk merancang program pendampingan pemberdayaan ekonomi desa. Ada juga *tools monitoring* perkembangan bisnis, modul pendidikan komunitas, rapor perubahan keluarga untuk memonitor perubahan aspek GEDSI, dan form perencanaan keuangan keluarga.

Dari program ini, telah ada 30 fasilitator lokal yang terdiri dari pengurus BUMDes. Fasilitator ini telah siap dan dapat merawat keberlanjutan dan mereplikasi pendekatan program paska program dan juga roadmap pengembangan bisnis BUMDes.

## **PEMERINTAH DESA**

SELAIN BUMDes, program ini juga telah mampu membangun komitmen pemerintah desa untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUMDes. Komitmen lainnya adalah membantu BUMDes pada saat Musyawarah Desa (Musdes), menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengurus, dan mengeluarkan surat keputusan pergantian pengurus.

Pemerintah Desa Wanasaba bahkan berkomitmen untuk kembali menglokasikan penyertaan modal desa pada tahun 2023. Desa Anjani melaksanakan LPJ pengurus pada akhir tahun 2022, sekaligus peremajaan pengurus dan menunggu proposal BUMDes penyertaan modal tahun 2023 yang ditetapkan melalui musyawarah desa.

Sedangkan pemerintah desa Lepak lebih fokus pada penambahan kapasitas usaha dan penambahan karyawan. Terutama dalam pengelolaan sampah. Dalam program ini, pihak Pemerintah Desa terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan. Hal ini dibutuhkan untuk melahirkan kesepahaman dan komitmen bersama dalam melakukan pembinaan kepada penerima manfaat program paska proyek.

Komitmen pemerintah desa secara spesifik nampak dari komitmen kepala desanya. Seperti Kepala Desa Anjani yang selalu aktif dan datang langsung dalam setiap kegiatan. Selain itu, Kepala Desa Anjani juga sangat antusias dan memiliki komitmen tinggi dalam memastikan keberlanjutan program ini.

Begitu juga dengan dua desa lainnya yang juga selalu menghadirkan staf inti untuk hadir dalam setiap kegiatan program. Hal ini untuk memastikan pengurus BUMDes selanjutnya masih berasal dari tim yang terlibat dalam program ini mengingat Desa Anjani dan Desa Lepak melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus BUMDes yang baru di akhir tahun 2022.

## **JARINGAN PEREMPUAN USAHA KECIL (JARPUK) DAN BANK NTB SYARIAH**

PROGRAM ini melahirkan sebuah perjanjian kerjasama antara konsorsium ADBMI dan ADBMI, bersama Jaringan Perempuan Usaha Kecil (Jarpuk) Rindang Lombok Timur. JARPUK Rindang berkomitmen secara aktif terlibat dalam memberikan bantuan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat baik saat dan setelah program.

Sedangkan Bank NTB Syariah membangun perjanjian kerjasama dengan tiga BUMDes penerima manfaat program. Bank NTB Syariah berkomitmen mendukung pengembangan bisnis keluarga penerima manfaat proyek.

## **ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BAPPEDA, Dinas PMD, dan Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur menyatakan dukungannya terhadap program. Karena itu, database para penerima manfaat telah diserahkan oleh konsorsium ke instansi terkait. Komitmen OPD juga telah dibuktikan dalam masa pelaksanaan World Super Bike pada November 2022 di Sirkuit Mandalika Lombok. Di bawah koordinasi BAPPEDA, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur memfasilitasi produk para penerima manfaat untuk dipamerkan di stand yang mereka miliki.



# CATATAN PELAYARAN: TANTANGAN, HAMBATAN, DAN JALAN KELUAR YANG DITEMPUH

**P**rogram ini menganut sejumlah prinsip inklusi dan memastikan *no one left behind*, *no harm*, dan prioritas perlindungan terhadap anak. Untuk memastikan pencapaian prinsip ini saat program berjalan, nakhoda bahtera Nuh (konsorsium) melakukan beberapa hal sesuai dengan instrumen yang termaktub dalam perencanaan program.

*Pertama*, konsorsium menggunakan pendekatan 'laki-laki baru' untuk menginduksikan nilai kesetaraan gender. Hal ini berupa sebuah gagasan memanfaatkan 'penjahat kesetaraan gender' sebagai aktor perubahan. Ide ini sebelumnya telah diulas pada bagian kedua (Replika Bahtera Nuh Bernama ADBMI) dalam buku ini.

Pendekatan laki-laki baru terwujud dalam upaya penentuan penerima manfaat program berbasis Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (Gedsi). Kita ketahui, seringkali penerima manfaat ditentukan oleh perangkat desa seperti kepala wilayah, termasuk pengurus RT/RW. Program ini menetapkan enam kriteria penerima manfaat. Hal ini dilakukan agar jangkauan program menysasar pada kelompok rentan dan terdampak bencana.

Langkah *kedua* yang diambil konsorsium adalah pemilihan penerima manfaat secara partisipatif. Dari data awal yang dikumpulkan, perangkaan dilakukan secara bersama-sama dan melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, tim data, BUMDes, dan pendamping masyarakat seperti kader pembangunan desa dan pendamping desa, hingga tim PKK dan Posyandu Desa. Skema inklusifitas ini salah satunya berdampak pada 69 persen dari penerima manfaat merupakan perempuan.

*Ketiga*, konsorsium memastikan kesetaraan gender. Program memberikan prioritas penerima manfaat perempuan, keluarga yang memiliki atau tengah mengasuh orang jompo, anak yatim, dan keluarga PMI (isteri atau anaknya yang berusia produktif). *Keempat*, memilih pelatih atau tutor bersperspektif gender. Narasumber, pelatih, atau fasilitator yang dipilih dipastikan tidak memiliki kendala gender. Baik latar belakang organisasi maupun personal.

Dari kelompok NGO, program ini bekerjasama dengan jaringan perempuan pengusaha Kecil yang selama ini fokus melakukan penguatan ekonomi perempuan dan mengkampanyekan kesetaraan gender. Sementara dari unsur pemerintah, program memprioritaskan narasumber atau pelatih dari unsur OPD yang telah memiliki regulasi PUG dan memiliki program yang tidak berlawanan dengan aspek Gedsu.



# **BADAI PELAYARAN LAINNYA DAN UPAYA MENENTUKAN HALUAN**

**S**elama program berjalan, muncul beberapa tantangan. Situasi ini seperti badai yang kerap muncul dalam setiap pelayaran. Konsorsium ADBMI mengidentifikasi beberapa tantangan tersebut menjadi beberapa bagian.

## **INTERVENSI OKNUM KEPALA WILAYAH**

HAL ini terjadi dalam penentuan penerima manfaat. Intervensi tersebut berupa keinginan memasukkan nama tertentu sebagai penerima manfaat, meminta pemerataan jumlah penerima manfaat di setiap dusun, dan mengganti penerima manfaat. Bahkan oknum kepala wilayah mengancam akan lepas tangan jika terjadi protes warga karena nama yang dia usulkan tidak ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Terhadap badai semacam ini, ADBMI melakukan pembahasan dan diskusi dengan memperluas partisipasi melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, Pokmas, dan tokoh perempuan desa.

### **IMAGE' ADA PENDATAAN BERARTI ADA BANTUAN**

HAL ini melekat pada masyarakat karena banyaknya program bantuan sosial ekonomi dari pemerintah. Sehingga setiap pendataan warga termasuk sensus penduduk dan verifikasi pemilih diasumsikan sebagai pendataan penerima bantuan. Dalam hal ini program memberikan penekanan kepada pendata untuk tidak memberikan janji dan tidak menggunakan untaian kata tertentu yang merujuk pada harapan atau peluang mendapatkan bantuan. Selain itu pendataan dilakukan secara tim yang memiliki anggota perempuan.

### **IMAGE LSM ADALAH RETORIKA**

ADA gejala tumbuhnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang cenderung 'menggangu' pemerintah dengan aktifitas mengintimidasi, memprovokasi masyarakat, dan terkesan berorientasi pada proyek. Konsorsium ADBMI dan ADBMI menepis isu tersebut melalui sosialisasi program baik secara berjenjang kepada pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Selain itu, ADBMI juga melakukan pendekatan secara personal kepada aparatur pemerintah desa melalui kunjungan langsung. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan didukung dengan perangkat pelatihan seperti modul dan prasarana memadai. Termasuk unsur pelatih yang kredibel dari perguruan tinggi dan praktisi atau profesional.

Selanjutnya, langkah yang diambil adalah memberikan ruang bagi pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk menghadiri setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini program mengharapakan terbangunnya integrasi program dan kegiatan, termasuk memberikan ruang pemerintah untuk mensosialisasikan program baik mereka.

## PERLAKUAN KHUSUS BAGI DISABILITAS, GENDER DAN KELOMPOK RENTAN

ADBMI menilai disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan sebagai kelompok yang cenderung pasif atau pasrah terhadap hak-hak sipilnya di pemerintahan. Untuk itu Konsorsium ADBMI dan ADBMI mengharapkan agar pemerintah desa mengaktifkan musyawarah khusus perempuan, anak, dan jompo sebagai bagian dari perencanaan pembangunan desa.

Dalam pemberian pelayanan publik, pemdes hendaknya merenovasi beberapa bagian kantor desa berupa akses masuk ramah disabilitas, fasilitas pelayanan publik seperti loket dan meja pelayanan, dan membuat ruang khusus bayi dan ibu menyusui. ADBMI juga mendorong penganggaran desa yang berpihak kepada kelompok berkebutuhan khusus. Keberpihakan anggaran tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk program pelatihan ekonomi produktif, penyediaan alat bantu dengar, alat bantu gerak, dan alat bantu penglihatan yang dalam aturan boleh dianggarkan, baik alokasi anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Tidak hanya pemerintah desa, kelompok peduli lainnya juga didorong agar membantu advokasi terhadap kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Karena mereka tidak semata mengharapkan donasi, namun juga keterampilan dan posisi setara. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut, Konsorsium ADBMI dan ADBMI memiliki kegiatan pendukung dalam program ini.

*Pertama*, pelatihan fasilitator bagi *champion* masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan fasilitasi termasuk kepada perempuan dan penyandang disabilitas. *Kedua* menjadi mitra ADBMI dalam pengembangan produk lokal, di mana ADBMI melalui Koperasi Bumi Raya (filantropi lembaga) siap menampung dan memasarkan produk UKM atau IKM. *Ketiga* ADBMI membuka

peluang bermitra dengan BUMDes dalam pengelolaan sampah, melalui Bintang Sejahtera Waste Management Company. *Keempat*, pelatihan pengolahan sampah (ekonomi sirkular) menjadi barang ekonomis, dan bentuk produk lainnya. *Kelima*, pelatihan manajemen dan aplikasi keuangan kepada BUMDes. *Keenam*, replikasi pembelajaran antar program dan antar wilayah yang telah dilaksanakan ADBMI.

# **KEMUNCULAN ISU PERLINDUNGAN ANAK SELAMA PELAKSANAAN PROGRAM**

**S**elain badai dalam pelayaran, ADBMI juga menemukan sejumlah isu anak yang terpotret selama pelaksanaan program.

## **PEKERJA ANAK**

RATUSAN anak yang masih duduk di bangku sekolah terlibat dalam kerja di sektor pertanian dan pengolahan tembakau. Hal ini kami temukan di wilayah tiga desa dampingan. Pernah ada edukasi tentang bahaya bekerja pada tembakau dan hak anak, namun sayangnya edukasi ini disponsori oleh perusahaan rokok.

Di sisi lain, orang tua dan anak tetap bersikeras mempekerjakan anak sebagai bagian dari pengajaran tentang keterampilan hidup. Hal ini menunjukkan masih rendahnya pengetahuan orang tua di lokasi tiga desa dampingan tentang hak-hak anak.

## **PENGASUHAN ANAK**

BEBERAPA anak PMI diasuh oleh nenek atau keluarga lainnya. Hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap hak anak

seperti hak hidup dan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Kondisi ini kerap terjadi terutama pada anak-anak yang dititip pada anggota keluarga yang pendidikannya rendah atau lanjut usia.

Penitipan anak pada keluarga terdekat juga tidak dapat menjamin bahwa anak-anak akan bebas dari ancaman tindak kekerasan maupun pelecehan. Kondisi ini sangat umum terjadi pada keluarga PMI yang dapat berdampak baik pada pola asuh anak ataupun kerentanan terjadinya '*broken family effect*' pada anak.

### **PERNIKAHAN DINI**

PERNIKAHAN dini menjadi salah satu faktor penyebab putus sekolah. Karena setelah menikah, anak cenderung malu untuk kembali duduk di bangku sekolah. Kadang sejumlah sekolah atau madrasah mengeluarkan si anak sebagai peserta didik. Pernikahan dini juga salah satu penyebab menjadi PMI. Pernikahan dini juga rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi dan perceraian.

### **STATUS ADMINDUK**

TIDAK sedikit PMI perempuan yang pulang membawa anak dari negara tempatnya bekerja. Karena status orang tua anak yang dirahasiakan, mereka biasanya enggan mengurus dokumen adminduk anak. Dampaknya sejumlah anak minder, perilaku berbeda, dan kadang enggan melanjutkan sekolah.

### **PEKERJA SEKS ANAK**

PEKERJA seks anak di tiga desa dampingan program masih berbentuk dugaan terkait adanya potensi. Hal ini didasari oleh adanya eksploitasi anak yang berasal dari daerah lain bahkan luar daerah yang dipekerjakan di klub malam, karaoke, dan tempat-tempat hiburan malam lainnya.

Atas dasar itu, ADBMI mendorong pemangku kebijakan untuk mengambil tindakan dalam mengatasi persoalan anak yang masih marak terjadi di tiga desa program. *Pertama*, pemerintah desa mesti membuat regulasi tentang pencegahan pernikahan dini atau pendewasaan perkawinan.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten perlu lebih pro aktif memberikan pendampingan kepada pemerintah desa. Demikian juga dengan kelompok peduli lainnya. Sejatinya program pencegahan pernikahan dini sudah ada dari tingkat Kabupaten, namun penerapannya seringkali terhambat oleh hukum dan kebiasaan adat. Oleh karena itu perlu pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif dan melibatkan semua lapisan masyarakat terutama di masyarakat hukum adat.

*Kedua*, peran Lembaga Pemerhati Anak Desa (LPAD) mesti dikuatkan. LPAD di tiga desa dampingan program sudah terbentuk. Karena itu ADBMI mendorong agar pemerintah desa memperkuat perannya untuk melakukan kampanye, pendataan, pemantauan dan advokasi anak. *Ketiga*, memberi penyadaran terhadap keluarga anak. Edukasi kepada keluarga yang melakukan pembiaran bahkan mengeksploitasi anak sebagai pekerja penting untuk dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelibatan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

*Keempat*, desa-desa lingkaran kawasan tiga desa dampingan dapat bersinergi satu sama lain. Salah satunya dengan membuat surat edaran bersama, keputusan bersama antar kepala desa yang salah satunya tentang pembatasan atau pencegahan pekerja anak di kawasan wisata.

Hal ini dimungkinkan karena regulasi untuk itu sangat mendukung. Dengan terbangunnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) akan terbangun juga tugas dan tanggungjawab bersama.

Dengan demikian, pemerintah desa juga tidak hanya fokus pada aspek pembangunan fisik, namun juga pembangunan sumber daya manusia masyarakatnya.

*Kelima*, pemerintah kabupaten diharapkan melakukan sosialisasi kepada desa-desa kawasan pendampingan, membuat himbauan tertulis di daerah pariwisata, himbauan melalui sekolah-sekolah, melalui kegiatan keagamaan dan secara rutin melakukan edukasi kepada orang tua.



BAGIAN KELIMA

**MENUJU  
PELABUHAN  
BARU**



# **BUAH MANIS DARI POHON KEBAIKAN**

**S**elama program berjalan, terdapat banyak sekali pengetahuan dan pengalaman baru yang ADBMI dapatkan. Hal itu berupa pelajaran-pelajaran baik yang secara signifikan memberi pengaruh jangka panjang, baik untuk proyek ini maupun untuk ADBMI selaku mitra penyelenggara. Sejumlah pembelajaran ini tak lain dan tak bukan merupakan intisari dalam implementasi program. Buah manis dari pohon-pohon kebaikan.

## **MELAHIRKAN KEYAKINAN PEMERINTAH DESA MEMBERI DUKUNGAN KEBIJAKAN**

DARI awal program berjalan, ADBMI secara intens melakukan koordinasi dengan kepala desa, perangkat desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Hal itu dilakukan untuk mengkomunikasikan program, menjelaskan posisi LSM, tujuan program, output dan manfaat bagi pemerintah desa.

Melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif pemerintah desa merasa dihargai keberadaannya. Kondisi itu berbuah akses masuk ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau persoalan.

Dalam upaya ini juga, pemerintah desa ikut aktif membantu mengkomunikasikan program dengan kepala wilayah, pengurus BUMDes, dan merekomendasikan orang-orang terbaik di desanya untuk terlibat dalam program. Selain itu, Pemdes dengan terbuka memberikan akses penggunaan sarana di desa seperti ruang pertemuan, alat komunikasi dan presentasi, dan memfasilitasi undangan.

### **MELAHIRKAN KESADARAN GENERASI MUDA TENTANG PENTINGNYA MANAJEMEN RISIKO BENCANA**

GENERASI muda atau milenial mengetahui sejarah bencana di desanya. Di mana sebelumnya pemuda desa cenderung acuh terhadap potensi bencana sebab terbatasnya narasi bencana skala desa. Sebagai contoh di Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, generasi muda hanya mengetahui bencana gempa bumi dan banjir rob yang kadang-kadang terjadi. Tidak ada pengetahuan mereka tentang sejarah bencana.

Sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang mengetahui kejadian gempa bumi disertai tsunami pada sekitar tahun 70-an di Lombok, atau letusan gunung samalas. Akibat dari hal tersebut, bencana dipahami sebagai takdir Tuhan tanpa memikirkan adaptasi dan mitigasi bencana guna menurunkan resiko bencana.

Selanjutnya generasi milenial mulai terbangun kesadarannya untuk memiliki pengetahuan manajemen risiko bencana. Lalu setelah muncul kesadaran tersebut, terbangun pemahaman bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia seperti penggunaan pestisida, penggunaan plastik, pengelolaan sampah yang berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan.

Dari sini muncul kesadaran pemuda melalui BUMDes untuk mengelola sampah sebagai salah satu pilihan usaha. Selain

mengurangi dampak lingkungan juga mendatangkan keuntungan secara ekonomis.

## **PERCAYA PADA POTENSI LOKAL**

DI awal ADBMI memulai program ini, ditemukan pengurus BUMDes yang tengah berada dalam keadaan demotivasi. Hal itu lahir dari rasa tidak percaya diri karena tidak mendapat dukungan dari kepala desa. Para pengurus yang tidak aktif bahkan menghilang dan usaha yang dijalankan gulung tikar.

ADBMI kemudian datang dan memberikan semangat baru pada mereka. Pemberian motivasi dilakukan dengan menyadarkan pada mereka tentang potensi yang mereka miliki. Dengan semangat baru dan rasa percaya diri yang tinggi, ADBMI mendampingi mereka merekrut pemuda-pemuda lokal yang kapasitas dan kemampuannya diragukan karena dinilai sangat rendah.

Setelah melewati beberapa pelatihan dan peningkatan kapasitas, potensi mereka dapat dimunculkan dan dimaksimalkan. Mental mereka terasah, kemampuan berbicara mereka di depan umum meningkat secara signifikan. Tentunya kepercayaan diri juga terangkat.

Buah manis yang dapat dipetik dari pohon kebaikan ini adalah 'kepercayaan'. Kepercayaan yang kami berikan kepada mereka untuk melakukan hal-hal baru dalam bingkai kebebasan berpikir dan berinovasi membawa perubahan signifikan pada diri mereka.

Proses ini tidak hanya menghasilkan potensi keberlanjutan dampak program, tapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) baru bagi ADBMI. Di mana selama ini kami tidak memiliki cukup banyak tenaga fasilitator yang dapat dimanfaatkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan.

## **MENDORONG TERLIBATNYA *CHAMPION* LOKAL**

BUAH manis lainnya yang dapat kami petik dari program ini adalah keberhasilan mendorong keterlibatan *champion* lokal sebagai ujung tombak program. Di mana *champion* lokal yang tergabung dalam tim manajemen komplain dipimpin oleh BUMDes dan beranggotakan kepala wilayah dan para tokoh masyarakat.

Tim ini terbukti efektif dalam meredam dan menetralsisir potensi komplain dan protes yang muncul sebagai akibat dari penetapan nama-nama penerima manfaat. Tim komplain diangkat dan dikukuhkan dengan surat keputusan (SK) kepala desa.

## **INTERNET SEHAT**

JARINGAN internet menunjang pengembangan bisnis BUMDes dan keluarga penerima manfaat. Saat ini kepemilikan gawai berbasis android nyaris menjangkau semua keluarga. Di satu sisi gawai memberikan dampak negatif pada penggunaannya. Di mana gawai menyebabkan berkurangnya interaksi sosial secara langsung dan juga mendorong inflasi karena pola konsumtif pembelian perangkat android terbaru, serta pulsa jaringan internet yang diperlukan setiap hari.

Namun di sisi lain, gawai juga dapat menjadi modal penunjang untuk penjualan berupa pemasaran produk dan transaksi jual beli. Proyek ini telah berhasil mendorong kesadaran keluarga penerima manfaat dan BUMDes untuk memanfaatkan internet desa dan gawai mereka untuk keperluan usaha. Sehingga dampak negatif sebelumnya dapat diputar balik menjadi dampak positif.

# BERKAH RBA BAGI PEMANGKU KEBIJAKAN

Setiap jalinan kerjasama pasti mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak. Setidaknya ada lima hal penting yang Responsible Business Alliance (RBA) berikan kepada pemerintah desa sebagai stakeholder utama di akar rumput.

*Pertama*, program membantu desa dalam menyediakan data kelompok rentan dan data pelaku usaha yang tidak termutakhirkan di database pemerintah desa. Di mana data ini dibutuhkan dalam menyusun rencana pembangunan desa. *Kedua*, program ini memperkuat relasi desa dan Kabupaten. Kegiatan yang dilaksanakan dapat memfasilitasi hubungan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, sehingga sejumlah program yang relevan dengan instansi terkait memungkinkan untuk dilaksanakan di tiga desa program pada tahun anggaran berikutnya. Termasuk memberikan perhatian lebih banyak terhadap permasalahan sosial ekonomi yang ada di desa program. Seperti masalah anak, stunting, dan pelaku UMKM kawasan Lombok.

*Ketiga*, program sebagai ruang sosialisasi pemerintah desa dan kabupaten. Dalam hal ini, kedua instansi tersebut juga

memanfaatkan pertemuan dan pelatihan yang dilaksanakan program untuk mensosialisaikan rencana pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah. Baik sosial, ekonomi dan politik. *Keempat*, program menjembatani hubungan dengan perbankan dan kelompok profesional. Di mana dalam sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, program menghadirkan para pihak sebagai narasumber dan memfasilitasi kerjasama kedua belah pihak.

*Kelina*, program memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat marginal atau rentan terdampak bencana, khususnya akibat pandemi Covid-19. Karena tugas penanggulangan dampak Covid-19 sebagian besar dibebankan kepada pemerintah desa. Program hadir memberdayakan dan membangun kepercayaan masyarakat untuk bangkit dari krisis akibat pandemi melalui sejumlah kegiatan pemberdayaan dan advokasi.



# PETA MENUJU PELABUHAN BARU

**K**ini replika bahtera Nuh telah sampai pada tujuannya. Para penerima manfaat, baik yang terdampak secara langsung dan tidak langsung telah merasakan dampak dari hadirnya program pemulihan ekonomi yang dilakukan konsorsium ADBMI. Namun perjalanan masih panjang. Setelah mampu keluar dari keterpurukan ekonomi akibat tsunami pandemi, para penerima manfaat butuh didampingi menuju keberlanjutan program yang kami gambarkan sebagai pelabuhan baru. Maka kami menyusun simpul peta perjalanan pendampingan berkelanjutan. Hal itu berupa serangkaian catatan rekomendasi.

Rekomendasi pertama adalah memperbaharui dan memperbaiki basis data penerima manfaat, kelengkapan konten, dan keragaman format dan penyajiannya. Data tersebut kemudian disebarluaskan kepada mitra strategis yaitu OPD terkait yang telah menunjukkan atensi dan komitmennya dalam mendukung keberlanjutan program ini terhadap basis data penerima manfaat. OPD terkait tersebut adalah Bappeda, Dinas PMD, dan Dinas Koperasi dan UKM, juga termasuk pemerintah desa.

Selanjutnya, BUMDes diharapkan dapat merawat relasi yang telah terbangun dengan perbankan, perguruan tinggi, LSM dan kelompok profesional (pelaku usaha) sebagai mitra usaha dan non usaha dalam pengembangan BUMDes. Hal ini merupakan strategi pengembangan BUMDes menurut regulasi BUMDes. Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong pemerintah desa untuk menjalankan program pembinaan teknis dan manajemen terhadap 100 orang penerima manfaat.

Selain itu, kami juga mengharapkan kepada Dinas PMD, Dinas Koperasi dan UMKM dan OPD terkait lainnya menjadikan penerima manfaat sebagai sasaran pembinaan dan memberikan prioritas perhatian. Hal ini penting mengingat kawasan Lombok memiliki potensi sekaligus tantangan yang akan berdampak luas pada masalah pembangunan kawasan apabila tidak disentuh dengan baik.

ADBMI juga mendorong pendampingan berkelanjutan dari perguruan tinggi mitra melalui berbagai aktifitas akademis seperti KKN tematik, dan riset-riset berkelanjutan. Setelah itu disusul upaya melestarikan kerjasama yang sudah terbangun seperti pengelolaan sampah dengan bank sampah Bintang Sejahtera, kerjasama produksi dan pemasaran penerima manfaat dengan Koperasi Bumi Raya, dan upaya-upaya penyelamatan lingkungan dalam rangka mendukung manajemen pengurangan risiko bencana.

Pelestarian dan pengembangan manajemen dan keuangan berbasis IT pada BUMDes sebagai piranti pengembangan usaha BUMDes menjadi bagian selanjutnya dalam rekomendasi.

Terakhir, perlu ada keterlibatan pemerintah dan provider seluler untuk mendorong adanya kebijakan internet murah atau bahkan gratis. Sehingga keluarga penerima manfaat dapat mengoptimalkan penggunaan internet untuk peningkatan ekonomi mereka.



**TSUNAMI OF PANDEMIC AND  
REPLICA OF THE NOAH'S ARK FOR  
INDONESIAN MIGRANT WORKERS**

**Tsunami of Pandemic and Replica of The Noah's Ark  
for Indonesian Migrant Workers**

***Lesson Learn Project***

*Migrant Worker Community Economic Recovery*

*Affected by Covid-19 in East Lombok*

*Editor*

Roma Hidayat

Fatih Kudus Jaelani

*Writer*

Roma Hidayat

Fauzan

Ridho

Firman Siddik

*Publisher*

Indonesian Migrant Workers Advocacy Foundation (ADBMI)

Responsible Business Alliance (RBA)

# PROLOGUE

**S**ome Sasak people believe that the shape of the granary roof and the roof of their house, which is like a mountain, was inspired by the story of Noah's ark. At that time, people had difficulty building houses because all the materials needed had been destroyed by flood water that emanated from the earth and the sky. So what was left at that time was only boat material. Then people build houses from existing materials. And just turn the boat upside down to make a roof for their house.

From that story, the Sasak tribe is confident enough to live in a building with a roof that they believed to be inspired by the ark which reflects the world's first disaster mitigation. Wherever they live, coastal or mountainous areas, they believe they will avoid disaster. Because they consider the roof of their house as part of their readiness to deal with flood disasters.

Lombok is indeed in the ring of fire disaster zone. A small island filled with irony. On it towers the second-highest volcano in Indonesia named Rinjani. Exotic white sand beaches, seaside islands with beautiful underwater charms, and the largest shipping bag for Migrant Workers in Indonesia. An island with extraordinary potential whose people are poor. The stretching of tourism management has not been able to overcome poverty. Currently, what has been proven to lift the community's economy significantly is migration to become migrant workers. Out of 10 adults, 7 of them had been migrant workers.

Then came the Covid-19 Pandemic. The first case was detected on

March 2, 2020. Furthermore, maybe for some groups, the Covid-19 pandemic is a small wave that cannot be felt from aboard their large cruise ship. But for the Sasak people, it was a tremendous wave. Specifically for the migrant worker community, it was a tsunami that devastated their lives.

Long before the pandemic, this group was the poorest and most vulnerable; landless farmers, single-parent women, low education, even illiterate in numbers and letters, and do not have any skills certification. Meanwhile, their boat is a small boat with small pegs. Right now they need help with a ride to rise from the pandemic tsunami, Noah's ark. Savior.

The book 'Tsunami Pandemic and Replica of Noah's Ark for Indonesian Migrant Workers' is extracted from hundreds of dialogues, dozens of series of meetings, pieces of training, and seminars organized by ADBMI as part of a project to deal with the economic impact of Covid-19 in three PMI Pocket villages in East Lombok Regency. The project, which has been implemented for 12 months, is an effort to ensure that groups of migrant workers can survive the economic tsunami caused by the pandemic. This is done by strengthening the capacity of Bumdes and PMI families.

This book contains a report on the results of the program that we present in the form of the parable of Noah's ark the savior. This is done so that the reader is not only focused on the program report narratives but can also enjoy the reality, inspiration, and bits of the messages in it.

Selong, January 2, 2023

**Roma Hidayat**  
Head of ADBMI

FIRST PART  
CHAPTER ONE

**PMI  
REPATRIATION  
TSUNAMI**





# THE WAVE OF MIGRANT WORKERS RETURNING

ROMA HIDAYAT

*“I felt helpless because more and more people with respiratory symptoms were coming ... It was like a tsunami movie where you see a wave coming and no one is doing anything.”*

*–Margarita Robles, Minister of Defense, Spain.*

**E**ntering 2021, the prolonged lockdown that occurred in the country where Indonesian Migrant Workers (PMI) worked caused a wave of repatriation or return to their country of origin. Like the tsunami, tens of thousands of PMI were repatriated to countries that are also struggling to deal with a pandemic. This condition is a new problem among the many problems faced by migrant workers amid the Covid-19 pandemic.

BP3MI Mataram noted that as of January to June 2021, 14,975 PMIs had returned to NTB. 13,670 of them were sent home because their work contracts had expired, and 6,250 came from East Lombok Regency. This amount is recorded data. We know that there is so much that is illegal and can never be recorded in the books of government agencies that should be focused on dealing with this matter.

At that time, the East Lombok Regency government provided services to thousands of PMIs who were sent home in stages. Starting with pick-up from the airport, quarantine for two weeks and finally taking PMI back to his hometown. However, it should be noted, this service is carried out to prevent the spread of Covid-19.

But apart from the concern about PMI contracting Covid-19, other concerns should be paid more attention to. This is the socio-economic impact of the wave of PMIs who, when they return to their hometowns, don't know what to do to keep the smoke from the family's kitchen still billowing. As befits the wave declared by the Spanish defense minister Margarita Robles, the PMI group is feeling a multiplier socio-economic impact amid no single aid that focuses on their problems. First, the regional locking in the placement country causes migrant workers to be unable to work. Meanwhile, their families who hope to live off remittances are also being made difficult by the conditions of economic growth affected by the Covid-19 pandemic. As a result, all of this has exacerbated family poverty.

On the other hand, PMI's family economic business developers are constrained by consumptive behavior, gender bias, and inefficiency in managing the household economy. Plus the lack of knowledge and skills to start and develop a business. This is also caused by the lack of institutional support and services that can support the birth and development of small-scale potential-based businesses at the village government level.

During this period, too, there was massive illegal recruitment. This problem surfaced when a fast boat accident carrying illegal migrant workers sank in the Malaysian sea. Dozens of PMI from East Lombok became victims. The possibility of incoming and outgoing waves due to the impact of the Covid-19 pandemic is very likely to occur. Here, socio-economic becomes a keyword.

# GOVERNMENT SMALL VESSELS

## DIRECT CASH ASSISTANCE FROM VILLAGE FUNDS

FAUZAN

**A**t the end of 2019, the world was shocked by the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). This virus was first detected in Wuhan, China. The virus spread very quickly throughout the world, including in Indonesia. Until 2022, even though a vaccine has been found to prevent its spread, it is not yet known when the situation will return to normal.

In this uncertainty, the Indonesian government through the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) has made efforts to restore the state of the national economy and the handling of Covid-19. One of them is through a program that has been implemented since 2015, namely the Village Fund (DD).

Based on PD'TT Village Minister Regulation Number 7 of 2021 concerning Priority for Use of Village Funds in 2022, village funds are prioritized for use for national economic recovery according to village authority, national priority programs according to village authority, and mitigation and management of natural and non-natural disasters according to village authority.

The priority for using village funds for national economic recovery according to village authority includes poverty alleviation; establishment, development, and capacity building for the management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) and or Joint-Village-Owned Enterprises (BUMDesma) to realize the village economy grows evenly; as well as development and development of productive economic enterprises.

The use of village funds for national priority programs according to village authority includes village data collection, mapping of potential and resources, and management of information and communication technology as an effort to expand partnerships for village development; development of tourist villages for evenly distributed village economic growth; strengthening vegetable and animal food security to create villages without hunger; prevention of stunting to create healthy and prosperous villages; as well as the development of Inclusive Villages to increase overall community involvement in village development.

Priority use of village funds includes mitigation and handling of natural disasters and handling of non-natural disasters and realizing a poverty-free village through Village Direct Cash Assistance (BLT).

In 2022 the government allocates Village Funds of IDR 68 trillion which are intended for 74,960 villages in 434 districts/municipalities throughout Indonesia. The total Village Fund allocation from 2015 to 2022 has reached IDR 468.9 trillion.

For the three villages in the working area of ADBMI and RBA, such as Lepak Village, Sakra Timur District, Anjani Village, Suralaga District, and Wanasaba Village, Wanasaba District, several policies have been implemented in handling Covid-19.

## **DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT)**

THE main priority for using village funds this year is the social protection program in the form of Village BLT. Village BLT is a cash disbursement to poor or incapacitated families in villages originating from village funds. This gift aims to help the rural poor, reduce the economic impact due to the Covid-19 pandemic, and become additional income to increase the purchasing power of the poor in meeting their daily basic needs.

The criteria for BLT beneficiaries are poor or underprivileged families who live in the village concerned and priority is given to poor families who fall into the category of extreme poverty. Furthermore, residents have lost their livelihoods, have family members who are prone to chronic illness, and poor families are recipients of other social safety nets, both from the APBD and/or APBN. Then there are also beneficiaries in the category of poor families who have been affected by the Covid-19 pandemic and have not received assistance or households with a single elderly member.

BLT is a very important instrument in handling poverty and alleviating extreme poverty in villages and is expected to ease the burden on rural communities affected by the Covid-19 pandemic. Either directly or indirectly. The amount of Village BLT given to Beneficiary Families (KPM) is IDR 300,000 per month. This assistance is distributed in stages every month for 12 months starting from January 2022. The 2022 Village BLT is allocated at least 40 percent of the village fund allocation in each village, or nationally the village fund allocation for 2022 Village BLT is a minimum of IDR 27.2 trillion.

The government of Lepak Village, East Sakra District, which is an ADBMI program village, has allocated Rp. 554.4 million for Village BLT. The amount of assistance was disbursed to 154 beneficiary groups with each person receiving IDR 300,000 for 12 months.

The determination of beneficiary groups is carried out through a hamlet deliberation process (Musdus) in all existing caducean areas. Furthermore, all the names of potential beneficiaries were determined in the village through village meetings (Musdes) which were attended by the Village Consultative Body (BPD).

### **HANDLING OF THE COVID-19 EMERGENCY**

IN addition to the BLT, the government of Lepak Village, East Sakra District also allocated a Village Fund of Rp. 110.2 million to handle the Covid-19 emergency by procuring the purchase of Covid-19 equipment such as procuring masks, hand sanitizers, hand washing buckets, body temperature check kits, and isolation house.

Apart from that, the Lepak village government has also allocated Rp 275.4 million in village funds for cash-intensive programs. The program is in the form of physical or infrastructure development, especially making aqueducts, opening farm roads, and paving roads between hamlets. Lastly is the handling of stunting which is allocated Rp. 22,770 million for two months.

SECOND PART  
CHAPTER TWO

**REPLICA  
OF NOAH'S ARK  
NAMED ADBMI**





# **ADBMI'S LARGE SHIP NAMED 'BUMI RAYA' COOPERATIVE**

ROMA HIDAYAT

**F**or 17 years organizing the PMI community and their families in East Lombok, Indonesian Migrant Workers Advocacy Foundation (ADBMI) has long carried out economic empowerment for families of Indonesian Migrant Workers (PMI) based on remittance management.

Facing the tsunami wave of the Covid-19 pandemic which had an impact on the socio-economy of PMI and their families, especially after the repatriation of PMI, ADBMI initiated an empowerment program intending to restore the economy of PMI and their families who were affected by the Covid-19 pandemic. The focus of the ADBMI program is to deal with socio-economic problems faced by PMI and their families amid the Covid-19 pandemic.

ADBMI's concern is the economic condition of the East Lombok PMI family, which has worsened due to the Covid-19 pandemic. Whereas not a few PMIs have difficulty sending remittances to their families in their hometowns. Because even if they are not sent back from the country where they work, there is nothing to do there. On the other hand, PMIs who were repatriated also faced more serious

economic problems. Especially girls. Some of the problems above made him immediately initiate the latest program. The program is the development of the creative economy of the PMI family. The form is in the form of assistance and provision of venture capital.

In addition to forming a beneficiary data collection team, ADBMI is also preparing a team to handle data collection issues. This is done to receive the recipient's data doubted or protested by residents in the program target locations.

So far ADBMI has had a quite good experience in developing business ventures as fundraising activities as well as assisting the migrant worker community. It has its module and competent human resources in economic empowerment.

One of ADBMI's best experiences can be seen from the BUMI RAYA cooperative as a source of fundraising which currently has more than 5,000 members with a total turnover of IDR 14.6 billion. In addition, there are more than 700 members who have started new businesses with scale medium. The Bumi Raya Cooperative is a large ship built by ADBMI and has been boarded by thousands of PMI and their families.

Now, during the tsunami returning PMI which has had an impact on the socio-economics of the PMI community, ADBMI presents an 'ark' that can be boarded by the PMI community and their families who are being tossed about by waves of repatriations due to the Covid-19 pandemic. This ark was strengthened with assistance from the Responsible Business Alliance (RBA) Foundation.

ADBMI is seen as capable of providing boats because of the large ships the program has built before. The ship is in the form of the program 'Expansion of the Economic Resilience Improvement Program for Poor Communities Who Become Migrant Workers in 12 Villages of the Rinjani National Park Forest Ring in East Lombok

Regency through Natural Resource Management Business Development (MCAI, 2016-2017) with a program targeting as many as 360 men. souls and women as many as 840 souls.

Another big ship that has been built and is sailing across the ocean of problems is Organizing a migrant worker community with a new male approach for gender-equal healthy migration in East Lombok District (Oxfam, 2015) with a target of 1,200 households. The previous large ship was a program for Reducing Poverty and Increasing the Economic Resilience of the Migrant Migrant Communities in 10 Main Sending Villages in East Lombok Regency (TIFA-Ausaid Foundation, 2014) with a target number of 4,000 households.



# WHY PMI AND THEIR FAMILIES NEED ARK

ROMA HIDAYAT

**T**he large ADBMI ship named the 'Bumi Raya' cooperative cannot necessarily be boarded by tens of thousands of PMI and their families who are being tossed about by the tsunami waves of the Covid-19 pandemic. Because 'Bumi Raya' whose members are the PMI family and those who are retired from PMI have also been shaken by the same wave. Therefore, a new ark is needed, which we then compare to a replica of Noah's ark.

This replica of Noah's Ark is part of a program called 'Gender Responsive Business Incubation for Migrant Workers in Regions of Origin'. This project aims to help the migrant worker community, especially women, to be able to create productive economic business activities that are gender-responsive as an alternative to family income during the Covid-19 pandemic.

As we know, the development of economic enterprises for families of migrant workers is constrained by many things. From what we have found so far, these include; consumptive behavior, gender bias and inefficiency in managing the home economy, low knowledge and skills in starting and developing a business, and a lack of institutional

support and services that can support the birth and development of small-scale potential-based businesses at the village level.

This program has at least three anticipated outputs or results including; increasing the ability of the migrant worker community affected by the pandemic in managing the household economy, and business development so that it is more productive, efficient, and gender-fair. And third is the development of support systems that can support business growth.

The implementation of the ADBMI Noah's Ark replica voyage was carried out for one year. With the budget from the RBA, ADBMI has developed a tool and system for measuring project success. This is in the form of preparing monitoring and evaluation plans, reports on changes in family management, and periodic and tiered monitoring and evaluation. In the sailing of the ship, ADBMI involved partners such as Village-Owned Enterprises (Bumdes) in the village implementing this project. Apart from that, ADBMI also involved the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning (DP3AKB) of East Lombok Regency, as well as of course ADBMI's large ship called the Bumi Raya cooperative.

Answering the main question in the title of this article, a replica of Noah's Ark is needed in a gender-responsive business incubation project for migrant workers in their areas of origin because most migrant worker communities in East Lombok have not been able to optimize remittances or money sent from abroad. Apart from remittances, what PMI and their families have not been able to optimize is the existing potential to create productive economic business activities.

Some of these things are also caused by the lack of knowledge and skills in starting, running, and developing a business. Not only that, PMI's family management is still patriarchal, centered on men, and

has not been supported by knowledge and skills to manage the household economy well. Therefore remittances will be used up for consumption alias cannot be used as initial capital to build a productive business.

Even though the mandate of the Village Law establishes village-owned business entities that are plotted as anchors driving economic activity in the village, the lack of experience and guidance to the village government makes it difficult for the existence of most Bumdes in East Timor to develop. In general, the climate and policy support that can support the birth and development of small-scale natural resource management-based businesses at the village level have not had a significant impact on encouraging the birth of new businesses in villages.

From this, in general, project interventions aimed at increasing the capacity of family economic management (including ensuring gender equality), increasing business development capacity and encouraging policy changes that are conducive to the growth and development of new businesses, and increasing the capacity and role of Bumdes as recipients of statutory mandates. village in the economic field.

## **REPLICA OF NOAH'S ARK PASSENGERS**

THE total direct beneficiaries of this project are 1,095 people, consisting of 399 adult women, 596 children under the age of 18, and 100 adult men. While the indirect beneficiaries are more than 4,000 people. This figure is an accumulation of estimates of those who benefit from the project from information dissemination activities. Starting from those who receive brochures, discussions with direct beneficiaries, interactions in economic activities inside and outside the project village, and stakeholders at the village and district levels.





# DEAL MEN FOR IDEAL SOCIAL CONSTRUCTION

## NEW MALE APPROACH TO GEDSI PROMOTION

ROMA HIDAYAT

It is common for a law enforcement officer like the police to talk about how to eradicate crime. But what if it was a lawbreaker who spoke up about how to eradicate crime? Scorched to the ground their deeds? It's interesting. Because who else is the most in control of the problem, the field, and the way to solve the problem of a crime if not them?

It was from that question that the idea of the 'new man' was born. What if the perpetrators of crimes of gender inequality in the construction of our patriarchal culture which is dominated by men not only discuss ways to eradicate gender crimes but directly intervene to be at the forefront of dealing with crimes that are often accused of being the actions of men?

The idea of using 'criminals' as the main characters in this change arose because nationally, the gender movement and Women's Rights in Indonesia were dominated by women with the strategy 'women rise against injustice and discrimination'. This causes perception bias and resistance from some circles.

This resistance often occurs in remote villages. Her perception is that gender mainstreaming is the movement of women against men. Gender is a women's issue, a western product issue that wants to destroy women. Damaging cultural and religious structures. So this movement exists and it is important to exist, as a complement, to fill the gaps created by existing approaches.

Gender is a women's movement, a front that is directly opposite men. In meetings at government offices, it is not uncommon for us to hear a saying that 'gender representation doesn't exist, or that gender sits in the front'. It turns out that what is meant is the representation of women. Then it turns out that this is the problem. Understanding of gender itself. Even government officials still have wrong perceptions about gender.

Due to social barriers in the form of negative perceptions, new men do not induce the concept of gender by not emphasizing the recognition of gender as a foreign term. This terminology does not need to be known, it is more useful if it is internalized and practiced. So how do these 'gender criminals' or men want to be actively involved in the movement? Then it is necessary to convince the men about the benefits they will pocket.

After understanding the concept of gender equality, the challenge or fear for men is that they will suffer losses in the form of having some of their 'traditional privileges' taken away. So it is very important to present research data and our observations about the advantages of gender equality for their lives. For example, the benefits as biological and sociological beings (positive impact on physical and psychological health), old age insurance due to improved relationships that are getting stronger because they are involved in child parenthood, reduced stress, and other relationships within the household.

Gender mainstreaming is mostly done with a conceptual approach and 'coercion' through threats and even positive legal action that applies to offenders. Advocacy related to this matter is generally aimed at producing various regulations. So in this case, a benefit-and-loss approach is needed (incentive approach) by providing opportunities for people to discover and prove for themselves the pleasures of practicing gender equality.

This can also be said as gender mainstreaming with a conceptual approach that places activists, donors, government, and outsiders besides the community as movement leaders and the community as the object or target group to be enlightened.

Meanwhile, with this new approach, the community itself is the main actor. In this new approach, people are directly directed to prove themselves in real life in their environment, what is the difference in their lives who are gender equal and who are not. Communities are asked to find a model in the style of their community. Finding and defining best practices in their respective environments.

One effective way to promote the 'new man' within the ADBMI experience is to organize a men's dream competition. The result is the 'new male twin sun'.



# THEORY OF CHANGE (TOC) AS AN APPROACH

ROMA HIDAYAT

**M**igrant workers and their families are one of the communities most affected by the non-natural disasters of the Covid-19 pandemic. This disaster undermined the family's main source of income where they had to face strict restrictions in the country where they work until they experienced termination of employment (PHK) which gave birth to a tsunami of repatriation or the return of migrant workers. This problem results in the loss of their family's income in the country of origin where the main source comes from remittances.

On the other hand, the families left behind experience the same problem. Lockdown policies or regional restrictions have hit the tourism sector which has been one of the mainstays on the island of Lombok. Visits of tourists have fallen sharply have made tourism businesses in a state of suspended animation. Likewise, the policy of limiting social activities directly affects small communities that only have income based on daily work. If you don't work or do activities that day, then there is no family income.

This fact makes this community very vulnerable to falling into

poverty so their resilience to the impact of disasters is very low. Therefore, through this RBA program, Advocacy for Indonesian Migrant Workers (ADBMI) designed an approach that aims to increase the economic resilience of migrant worker communities in dealing with the impact of the Covid-19 Pandemic.

The theory of Change (ToC) or theory of change that we use as an approach in this program is 'if the migrant worker community is taught to establish and run entrepreneurship as an alternative source of income and Village-Owned Enterprises (BUMDes) can play an active role both as partners and coaches. With these entrepreneurial groups, a business ecosystem will be formed so that the community of migrant workers and their families will be economically resilient and able to adapt to the impact of a pandemic, either Covid-19 or other disasters in the future.

Cumulatively, the ToC that we have designed aims to increase the economic resilience of migrant worker households (in particular, priority is given to women) who are economically affected by the Covid 19 pandemic through gender-responsive business incubation as an alternative to family income during and after the Covid-19 pandemic. **The Pattern of Determining the Passengers of the 'Ark'**

Before the replica of Noah's ark docked, ADBMI first conducted Focus Group Discussions (FGD) three times in each program village. The first phase of the FGD was conducted to explore the response and support from the village government, village consultative body, village institutions, and local leaders for the program implementation plan. In this case, the village government strongly supports the existence of a replica of Noah's Ark. This support can be seen from how the village government coordinated regional heads to assist the project team in the initial data collection process.

Further, FGDs were conducted to identify the data collection team

as partners in the beneficiary data collection. In this focused discussion, the BUMDes management was agreed and approved as the data collection coordinator. They were also assisted by youth organizations and village cadres as data collection teams. In addition, in this first phase of focused discussion, ADBMI provided a shared understanding of the six criteria for beneficiaries or what we call the passengers of Noah's Ark replica for PMI. In this last discussion, it was mutually agreed, the data team began their work by recording as many potential passengers as possible.

The second phase of the FGD discussed data collection techniques which included data content, filling techniques, interview techniques, and attitudes. One of the agreements was to collect data using the Google form application that had been prepared by ADBMI. Furthermore, the preparation of data collection schedules and division of teams. Ended with a simulation of filling in the data format.

Finally, the third phase of the FGD was carried out after the data collection was completed. The FGD brought together the data collection team, regional heads, representatives of potential beneficiaries, and the village government. The focus of the FGD was to verify and validate data together with the data collection team, regional head, village government, and village facilitators. After that, the FGD also discussed handling complaints and problems that play a role in providing information, handling complaints, and facilitating the resolution of disputes and community dissatisfaction.

From the results of discussions with the village administration and the local committee team (BUMDes), we mutually agreed to limit the survey to 200 PMI families in the three program villages. With this, the total number of PMI families is 600 families. This limitation was made to streamline implementation time due to a large number of

PMI families. On the other hand, restrictions are also made to reduce the risk of misunderstanding survey objectives. Where most of them understand that every PMI family that was visited in the initial data collection process is certain to receive assistance.

Of the 600 families found in three villages, the team screened 180 definitive beneficiaries based on the ranking or scoring criteria set out in the program plan. This criterion refers to facts on the ground that are extracted from information from regional heads. In this process, the team formed a special complaint management team led by BUMDes and consisting of regional heads and community leaders.

This team is in charge of mitigating and neutralizing potential complaints and protests that may arise as a result of the determination of names of the beneficiaries that have been determined. This team was appointed and confirmed by a decree (SK) of the village head. The database assessment process was carried out in a participatory manner using the home visit method. So that the real conditions of the potential beneficiaries are known precisely.

The results of the assessment were presented at the village forum which allowed the village community to criticize and provide input. The results of the entire process were then published and only then were the results of the assessment determined as the village beneficiary database.

The composition of the beneficiaries based on the set criteria is 55 PMI failed to leave, 3 PMI families, 33 PMI female heads of household, 12 elderly/dependents with disabilities, 165 repatriated migrants or repatriates consisting of 69 percent women and 31 percent men man.



THIRD PART  
CHAPTER THREE

**THE CAPTAIN  
SHIPPING  
LINE**



# THE CAPTAIN SHIPPING LINE

## ANNOUNCING SHIPPING TO POLICY STAKEHOLDERS

AFTER the passengers have been selected and the ship is ready to sail, we announce this rescue project to the stakeholders through seminars. The seminar was held at the district level in collaboration with the Regional Poverty Reduction Coordination Team and the District Development Acceleration Study Team.

In seminars, we disseminate program implementation plans to obtain responses from stakeholders, and identify partners to support program implementation. The announcement of the voyage was attended by 161 people from government elements, namely Regional Apparatus Organizations (OPD), community organizations, student organizations, women's organizations, economic actors, village government, tourism actors, and tourism village activists.

The OPD representatives who attended were OPDs that had relevance to village government, and social and economic empowerment (UMKM and IMKM). The OPDs are Bappeda, the Cooperative and MSME Office, the Social Service, the DP3AKB

Office, the Manpower and Transmigration Office, the Community and Village Empowerment Service, the Tourism Office, and the Agriculture Office. There are also regional government institutions from elements of community organizations concerned with development policies, economic empowerment actors, advocacy actors, village assistants, and community empowerment cadres.

Meanwhile, from the elements of business actors, there were Regional Tourism Promotion Boards (BPPD), travel agencies, tourism awareness groups, tourism actors, student organizations, village government, volunteers, and village development activists.

In the seminar, we identified several results. First, we found relevant technical OPDs in assisting the voyage of the Noah's Ark replica, namely the PMD service, the social service, the cooperative and MSME service, and DP3AKB. Second, OPD support for program implementation plans in the form of data integration, strengthening BUMDes and village government capacities, and access to the coordination of results, program implementation challenges, as well as potential policy support.

## **ROADSHOW TO SELECTED STAKEHOLDERS**

ANOTHER step taken by ADBMI in announcing the program's shipping was to conduct a roadshow to selected stakeholders. This activity was carried out to communicate the results of data collection on the target group, type of business, constraints, and needs, especially related to the impact of the Covid-19 disaster.

Stakeholders were selected from as many as 20 institutions and divided into seven elements. First, elements of the local government consist of the PMD Service, the Cooperative Service, the Trade Service, and the Regional Disaster Management Agency (BPBD). The two elements of the village government from the three program

location villages, the three elements of regional government supporting institutions namely the Regional Poverty Reduction Coordination Team and the Regional Development Acceleration Team.

Furthermore, the fourth is elements of civil organizations in the form of village facilitators, organizations for people with disabilities, youth organizations, women small entrepreneur networks (Jarpuk), and local East Lombok Non-Governmental Organizations. The fifth is the element of business actors which in this case involves Bhineka and Aronawa Company and local business actors. The six elements of the financing or funding sector are Bank Rakyat Indonesia (BRI) and Bank NTB Syariah. Finally, universities, in this case, we involved Mataram University and Mount Rinjani University (MRU).

Roadshows are carried out in the form of direct visits to the offices of relevant agencies, home visits, public discussions, workshops, and online discussions. The meeting was held from 16 to 18 February and 26 February. This visit will continue on April 11 to 12, and April 15 and 17 2022.

These efforts yielded several results. *First*, there were two cooperation agreements, namely with the Women Small Entrepreneurs Network (Jarppuk) in terms of economic training support for the target group, and a cooperation agreement with PT Aronawa, namely aronawa.com, a national digital marketing company as a financial system provider.

*Second*, the roadshow gave birth to OPD's commitment to be involved in training, institutional development, and data integration. *Third*, program integration with government ad hoc institutions, namely TKPKD and TPPD in the form of support in facilitating venues for activities, communication and follow-up meetings, lobbying, and hearings with local governments.

*Fourth* is the integration of disaster mitigation plans through the establishment of Disaster Resilient Villages in the three program location villages. *Fifth*, the commitment of village heads in the three program locations was created to strengthen the role of BUMDes in fostering and developing MSMEs in their respective villages.

### **Information and Education Media Development Workshop**

This activity aims to identify types of media that have the potential to be developed and identify important issues to be published in information and educational media content. The workshop presents participants from local government elements, local mass media, creative entrepreneurs, social groups (BUMDes, data collection team, representatives of migrant communities, disabled groups, academics, NGOs, business practitioners, financial institutions, PMD services, the COVID-19 task force, the cooperatives and MSMEs, and assistant I to the Regional Secretariat of East Lombok).

The workshop produced recommendations consisting of; (a) Programs must be able to use social media wisely in communicating disaster, conflict and environmental issues; (b) Strengthening the understanding (education) of gender issues, people with disabilities, and vulnerable groups as a strength, not as a social burden; (c) documenting good practices in handling Covid-19 from community initiatives; (d) Dissemination of climate change issues for awareness and mitigation actions; (e) critical education on the development policies of East Lombok Regency, especially the three program assisted villages.

## **GENDER EQUITABLE HOUSEHOLD ECONOMIC MANAGEMENT TRAINING**

THROUGH this activity, 180 beneficiaries have been trained who

have been mapped in the previous activity. The training was held in each village, and facilitated by JARPUK (Women Small Entrepreneurs Network), the Office of Cooperatives and UMKM, and Bank Rakyat Indonesia (BRI).

This activity provides beneficiaries with knowledge on how to manage finances at the most basic level, namely the household. They are trained to record expenses and income to familiarize them with an order in making simple financial administration. This is needed when they run a business as one of the first steps to entrepreneurship in a professional and accountable manner.

From the post-activity post-test documents, most of the participants were quite good at making a Household Income and Expenditure Budget Plan (RAPBRT). In the process, they realized that their household financial management had not been good, considering that the form indicated that there were still more expenses than the income they earned. Most of the beneficiaries concluded that they experienced losses that resulted in debt accumulation.

This training shows them the importance of good household management. This positive impact was then seen from the testimonials they shared after the training. Apart from that, they also don't just practice managing finances but gain knowledge to be prepared for disasters.

The training is expected to increase community capacity against disasters that are almost certain to occur. Along with the socio-economic changes they face. In their context as PMI retirees or PMI families, this educational content is expected to enable participants to be able to plan how to use remittances for productive businesses in the form of savings. Including financial preparedness during a disaster.

## **CONSULTATION SERVICES AFTER TRAINING**

CONSULTING services are carried out as part of after-training support. This activity was carried out twice for families who had attended the MERT training. The technical implementation of consulting services is carried out using home visits.

Before providing services, the team first prepares the main issues and a list of guiding questions. Next, identify the families to be visited who are randomly selected which represent the six criteria of beneficiaries. Only after that was an in-depth approach conducted on the participating households that showed significant changes, and on families that had not shown any changes.

From the visit, it was found that as many as 180 program beneficiaries had been facilitated in revising the business plan. There are obstacles to preparing household financial books. Furthermore, beneficiaries are facilitated in making NIB for beneficiaries (SMEs) who have not been facilitated during the training. Finally, the plan for assisting participants who have or are currently running their businesses.

## **BUSINESS PLANNING MAKING TRAINING (BUSINESS FEASIBILITY)**

THE activities that are still included in the captain's voyage are carried out to facilitate capacity-building targets in preparing appropriate business plans, developing self and environmental potential, creating cooperation, and building business networks. Training using modules with the main material consisting of (1) Finding ideas in business; (2) Making a business plan (with a canvassing business approach); (3) Product Development; (4) Financial Management; and (5) Business Institutions and Business Legality.



In addition, ADBMI and ADBMI provide an understanding of risk management analysis in business as an important part of business continuity so that micro-enterprises have strategies for getting out of pressure, continuity of production, and business competition, including changes in banking policies. The output achieved: a. Each participant (180 participants) can identify at least 5 (five) types of potential business ideas and choose one type of business to develop a business plan; b. participants can prepare bankable business feasibility (180 organized business feasibility); c. Participants can prepare production and product development plans for 1 year period; d. 90% (163 people) were facilitated to make NIB (Business Identification Number) which is a requirement for MSME actors.

To prepare a bankable business plan, the business plan format is based on the results of coordination with Bank NTB Syariah, and then the business feasibility is verified by the bank with the aim that it meets eligibility if the business actor wants to apply for KUR (People's Business Credit).

## **PROCESSING TECHNICAL TRAINING ACCORDING TO SUPPORTING NEEDS AND POTENTIAL**

THE training aims to improve product quality according to product health and safety standards (for food products), increase added value, and be able to carry out production according to market needs. Training groups based on business clusters, namely: (1) Culinary business actors (processed food and beverage products) with material: Utilization of marine products and agricultural products, Serving and packaging food safety, Markets, and marketing strategies.

This training involved culinary entrepreneurs, the Department of Trade, and the Office of Health. (2) Service business actors, with

training materials namely: market surveys and consumer trends, service quality, introduction and use of environmentally friendly technology. In addition to the training facilitators, resource persons were involved from elements of tourism actors, the Department of Commerce, and the Office of Industry.

The results of this training are: a. Participants have a product development plan based on local potential (various types of seafood and agricultural products); b. Participants know the types of needs and quality standards needed by the tourism sector that can be collaborated with the community such as laundry services, catering, and dessert menus such as various fruits; c. know food product safety standards including halal standards, types of packaging, and packaging techniques.

### **COMMUNITY TRAINING OF FACILITATORS (TOF) FOR BUMDES ADMINISTRATORS WHO PRIORITIZE STRENGTHENING COVID-19 PREVENTION MATERIALS**

THIS training aims to provide facilitation skills to 15 BUMDES administrators (5 people each BUMDes) to form community-level facilitators (community facilitators) and prepare facilitators for the development planning process in the village (responding to the needs of the village government).

Materials in this training are Communication techniques, training management (curriculum and learning resources), facilitation techniques, preparing learning/training needs, and classroom control (building atmosphere, energizing, and process control). The results of the training area. Participants master (able to practice) communication techniques in front of the class as facilitators; b. Able to prepare training designs (materials, time, equipment, processes, technical/facilitation steps) to support

learning processes and outcomes; c. Participants can practice several types of energizers and mood swings according to the learning situation.

In addition, by understanding technical andragogy or Adult Learning Learning (PBOD) TOF participants have self-motivation to develop various communication techniques and understand the obstacles in facilitating and strategies for solving them. The training was held for 3 (three) days, with the main facilitator of the training, namely the team from JARPPUK.

### **INTERNET UTILIZATION TRAINING TO SUPPORT BUSINESS ECONOMIC DEVELOPMENT**

THIS training aims to provide facilitation skills to 15 BUMDes administrators (5 people each BUMDes) and aims to provide awareness and skills in using the internet wisely and productively, especially for promotion, marketing, and developing business networks.

The material in this training includes an introduction to promotion and marketing service providers, an introduction to internet-based applications for PCs and Android, application management and utilization, and internet-based promotion and marketing strategies. Results of training (output): a. Marketing and financial applications installed on participants' laptops and androids (BUMDes administrators), b. Training participants can create marketing and promotional content to be posted on social media (Facebook, Twitter, Instagram) as a marketing strategy. The main facilitator of this training is the management of PT Aronawa as the provider and media consultant for national multimedia.

## WORKSHOP SERIES ON STRENGTHENING THE ROLE OF BUMDES

AIMS to strengthen the role of BUMDes in development as a village-owned economic institution, encouraging the role of BUMDes in developing business and community development. Activities carried out 5 times. *First* is BUMDes advocacy technical assistance. It is carried out to provide understanding to BUMDes management about advocacy steps for BUMDes development including access to village government finance, access to collaboration and networking with the private sector, and community advocacy strategies by BUMDes. *Second*, the Workshop on the integration of Gender Justice and Social Inclusion (GESI) in development.

The workshop encourages increased participation and equal roles between men and women in the village. Often the involvement of women in peripheral and complementary roles. The expected change is the accommodation of women's voices, and the needs of persons with disabilities and vulnerable groups in planning and budgeting aspects. Included in every disaster and crisis incident, women, children, the elderly, and the disabled often become victims at a higher rate. Therefore, related to preparedness, villages must be able to adopt disaster management SOPs that are in favor of these vulnerable groups.

Furthermore, the *third* is a workshop on monitoring and evaluation capacity building. The activity was carried out in Sembalun District, East Lombok to strengthen the role of the management in monitoring and evaluating beneficiary groups both in the use of capital assistance and in business development. *Fourth*, experience sharing discussions and integration of mentoring program mentoring. This activity was carried out in several places

(lesehan, restaurants, and public places) with local NGOs, social observers, and regional development. Fifth, lobbying and hearings with stakeholders in the context of developing training outcomes for beneficiaries.

This activity received a positive response from stakeholders, including in the form of plans by several agencies in East Lombok Regency to integrate data-based programs produced by BUMDes. And *fifth*, building the capacity of BUMDes management to welcome the 5.0 era, aims to increase the knowledge of BUMDes management regarding digital business management. It is hoped that participants will be motivated to carry out digital-based business planning and be familiar with the various forms and functions of digital platforms. This training helps BUMDes administrators prepare themselves for the ever-evolving developments in information and communication technology.

## **WORKSHOP ON PREPARATION OF BUMDES BUSINESS DEVELOPMENT ROADMAP**

THIS activity was carried out twice. The first workshop was about the technical preparation of the BUMDes development roadmap draft and the BUMDes annual work plan. The two workshops discussed the final draft of the BUMDes business development roadmap. BUMDes participants consist of 5 BUMDes administrators, village assistants, and Bumdes supervisors representing the village administration.

The first workshop began with a review of Presidential Decree No. 4 of 2021 concerning BUMDes and BUMDes together between villages. Technicals for preparing roadmaps and annual work plans, SWOT analysis, identifying potentials and constraints, and preparing the initial draft of the roadmap.

While in the second workshop, a review of the progress of drafting was carried out, discussion of the draft roadmap and work plan. Then proceed with the finalization. Starting with the roadmap, BUMDes Anjani and BUMDes Wanasaba start with building BUMDes trust in the village government and community. This is because BUMDes is still in a vacuum with administrators who were not active before.

Meanwhile, BUMDes Anjani begins with structuring the BUMDes business because institutionally or the management there are no significant problems. Thus BUMDes only needs to continue the business that has developed, develop business units and carry out management accountability. After continuing the permanent management, BUMDes Wanasaba and Anjani then reactivated the business that had been running before. This was followed by business development by preparing strategic plans such as opening new types of businesses.

The workshop continued with seminars and the publication of the BUMDes roadmap for the three program villages. The seminar was attended by elements of the district government, GOW, representatives of persons with disabilities, observers of village development, and the village government of each village where the program is located. Apart from that, the local government was also present, represented by the East Lombok Regency PMD Service, BAPPEDA, and business actors acting as roadmap discussants.

Meanwhile, the Office of Social Affairs, GOW, the Office of Cooperatives, and SMEs act as a comparison. Several inputs were provided by the discussion and comparison regarding business plans, institutions/management, human resource capacity, as well as opportunities and obstacles. Meanwhile, the East Lombok Social Service and P3AKB Office highlighted the importance of the village government's role in preventing child labor in the Lepak beach area.

The preparation of the roadmap is considered capable of giving the village government confidence in BUMDes, indicated by the commitment of each village head to allocate the BUMDes capital investment budget in the 2023 fiscal year, provided that changes and strengthening of management must be carried out, as well as financial accountability in the BUMDes accountability report.

### **PROVISION OF CAPITAL ASSISTANCE PACKAGES AND PRODUCTION EQUIPMENT**

PRODUCTION capital has been provided to all beneficiaries in the form of funds channeled through Bank NTB Syariah. Beneficiaries already have their accounts and ATMs. Furthermore, BUMDes and the village government monitor the use of assistance to support the planned businesses.

Initially, assistance would be provided in the form of goods or production facilities, but due to time constraints and the various types of equipment needed that could potentially take a long time to procure, cash assistance was chosen.





FOURTH PART  
CHAPTER FOUR

**AFTER  
THE ARK  
DOCKED**



# **THE REPLICA OF NOAH'S ARK (ADBMI) HAS ARRIVED**

It's not too much if ADBMI compares this program to a replica of Noah's Ark for Indonesian Migrant Workers amid the Covid-19 Pandemic wave. The goal of the economic recovery program for the migrant worker community affected by Covid-19 in East Lombok through gender-responsive business incubation for migrant workers in this area of origin has been achieved.

## **VULNERABLE COMMUNITIES**

THIS program has been able to build critical awareness of community groups such as youth groups, village development cadres, and BUMDes administrators in disaster mitigation such as Covid-19 and the global crisis. Young beneficiaries have a new business mentality (entrepreneurship). This gave birth to a new view of the world of work. Where they do not have to work in the formal world, both government and private, or even more so become migrant workers.

MSME actors increase capacity through strengthening technical capacities such as product development, processing, and packaging.

This was done to improve and develop the business scale. The training they received also really helped them understand product aesthetics related to the presentation and packaging of hygienic products that attract consumers, increase the added value of production based on local ingredients, and use leftover materials by changing shapes and adding a little extra material. And most importantly, families can provide healthy and varied food products for their families.

Through strengthening management capacity in the form of planning, promotion, and marketing, business actors have the confidence to compete with other business actors. Including facing business competition in the digital era.

MERT Management training, marketing, promotion, use of digital media, and others make program beneficiaries a better business plan. They are also better able to read market opportunities or potentials, make business feasibility, and build partnerships with Village Owned Enterprises (BUMDes) and business actors involved in the training.

Beneficiaries also gain knowledge and skills related to business management, technical skills related to improving product quality, networking, and access to stakeholders. This is strengthened by the assistance of business capital and knowledge base from the perspective of gender, disability, and social inclusion (Gedsi) in managing the household economy.

Furthermore, as many as 180 beneficiary families have been able to prepare and have household economic planning documents in the form of business proposals.

In the Gedsi aspect, beneficiary families have been able to realize the importance of organizing family deliberations by involving all family members (husband, wife, and children) in a democratic atmosphere to produce effective and productive planning. Especially

to determine strategic decisions, such as buying and selling family assets, and how remittances are obtained from remittances from families working abroad. They have also realized that gender inequality in the family can lead to an ineffective and consumptive economy.

In addition, beneficiaries have a channel of communication with BUMDes, the manager of the village government, which can be a way for them to be involved and can access information about development organized by villages at the sub-district, district, provincial and national levels.

The beneficiary has already conducted an introduction to the bank and bank literacy. This is manifested by owning an account and understanding the benefits of family savings. Meanwhile, in terms of business capital assistance, direct beneficiaries have additional capital to start and continue a business that was halted during the Covid-19 pandemic.

The capital assistance is used to purchase new equipment and production materials, repair equipment, and renovate business premises. This is very much needed because as long as the business is not running, some of the equipment is damaged and even has to be sold to cover losses. Then the assistance can reduce the cost of care and at the same time meet the needs of the family.

As a result, micro-entrepreneurs, both services, and industry have difficulty restarting their businesses. For example, for those who run a laundry service business, capital assistance is used to buy necessities such as soap, deodorizers, plastic packaging, and irons. That way, they have started to dare to accept orders from some hotels and inns in the vicinity. After that, they also dared to add employees, so that economic activity was slowly getting back on track.

## **MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDES)**

BUMDes as a tactical partner for program implementation gets many benefits that bring significant changes in its development. Business management training provided to BUMDes administrators gave birth to new enthusiasm for administrators in the three program villages.

This can be seen from the activeness of the management who previously had no or lacked enthusiasm for advancing BUMDes. This activity occurred in BUMDes Anjani and Wanasaba. Meanwhile, BUMDes Lepak added BUMDes administrators.

This program facilitates BUMDes communication with the village government which previously did not go well. Also in this program, BUMDes are assisted to be able to convince the Village Government about increasing the capacity of BUMDes administrators by carrying out various activities to strengthen the capacity of BUMDes administrators.

BUMDes has several instruments such as business planning documents, business actor data, and digital tools that can be developed for the continuity of BUMDes in the future. In addition to active management, BUMDes also has a five-year plan or BUMDes development roadmap and BUMDes business planning. In addition, the capacity of BUMDes administrators has also increased significantly where they are now playing a role as local committees and facilitators in every activity that involves beneficiaries in the village starting from the stages of assessment, and training to the distribution of capital assistance.

Each of their active involvement in these stages, their role is very important in ensuring the continuation of post-program assistance. Where they can recognize and understand both the personal and

business characteristics of the MSMEs that are formed in this activity.

In addition, this program has also been able to renew the spirit, commitment, and orientation of BUMDes existence. This can be seen from efforts to complete the BUMDes managerial structure and completeness. The management also has relevant knowledge and skills in the form of community facilitation techniques, digital marketing, and networking with stakeholders. And most importantly, the management has a knowledge base from Gedsi's perspective in assisting micro-business development.

BUMDes team capacity has increased. Now they have high self-confidence because they have public speaking skills and community facilitation. This can be seen when they held household economic management training. They can convey activities very well without significant errors. They seemed highly motivated and created some good improvisations to facilitate discussion.

In addition to the capacity of the administrators, BUMDes also has an assessment tool and database that can be used in the future to design village economic empowerment assistance programs. There are also tools for monitoring business development, community education modules, family change reports to monitor changes in GEDSI aspects, and family financial planning forms.

From this program, there have been 30 local facilitators consisting of BUMDes administrators. This facilitator is ready and able to maintain sustainability and replicate the post-program approach as well as the BUMDes business development roadmap.

## **VILLAGE GOVERNMENT**

APART from BUMDes, this program has also been able to build the village government's commitment to fostering and developing BUMDes. Another commitment is to assist BUMDes during Village

Conferences (Musdes), submit management accountability reports, and issue decision letters for changing management.

The Wanasaba Village Government has even committed to re-allocating village capital participation in 2023. Anjani Village will implement an LPJ management at the end of 2022, as well as rejuvenate the board and wait for the BUMDes proposal for capital investment in 2023 which will be determined through a village meeting.

Meanwhile, the Lepak village government is more focused on increasing business capacity and adding employees. Especially in waste management. In this program, the Village Government is actively involved in every activity. This is needed to generate mutual understanding and commitment in guiding beneficiaries of post-project programs.

The village government's commitment is specifically visible from the commitment of the village head. Like the Head of the Village, Anjani, who is always active and directly involved in every activity. In addition, the Head of Anjani Village is also very enthusiastic and has a high commitment to ensuring the sustainability of this program.

Likewise, the other two villages also always have core staff present in every program activity. This is to ensure that the next BUMDes management will still come from the team involved in this program, bearing in mind that Anjani Village and Lepak Village will hold a deliberation meeting for the selection of new BUMDes management at the end of 2022.

## **SMALL BUSINESS WOMEN NETWORK AND BANK NTB SYARIAH**

THIS program gave birth to a cooperation agreement between the ADBMI and ADBMI consortium, together with the Rindang East



Lombok Women's Small Business Network (Jarpuk). JARPUK Rindang is committed to being actively involved in assisting beneficiary families both during and after the program.

Meanwhile, Bank NTB Syariah built cooperation agreements with three BUMDes beneficiaries of the program. Bank NTB Syariah is committed to supporting the development of the family business of project beneficiaries.

## **REGIONAL ORGANIZATIONAL ORGANIZATION (OPD)**

### **EAST LOMBOK REGENCY GOVERNMENT**

BAPPEDA, the PMD Service, the East Lombok Cooperative, and UMKM Office expressed their support for the program. Because of this, the database of beneficiaries has been submitted by the consortium to the relevant agencies. OPD's commitment has also been proven during the implementation of the World Super Bike in November 2022 at the Lombok Mandalika Circuit. Under the coordination of BAPPEDA, the Regional Government of East Lombok Regency facilitated the products of the beneficiaries to be exhibited at their stand.



# **SAILING RECORDS: CHALLENGES, OBSTACLES, AND SOLUTIONS TAKEN BY THE CHAPTAIN**

**T**his program adheres to many inclusion principles and ensures no one is left behind, no harm, and prioritizes child protection. To ensure the achievement of this principle when the program was running, the captain of Noah's Ark (the consortium) did several things according to the instruments set out in the program planning.

*First*, the consortium uses a 'new man' approach to induce the value of gender equality. This is in the form of an idea of using 'criminals of gender equality' as actors of change. This idea has previously been reviewed in the second part (Replica of Noah's Ark Named ADBMI) in this book.

The new male approach is manifested in efforts to determine beneficiaries of programs based on Gender, Disability, and Social Inclusion (Gedsi). We know that village officials such as regional heads, including RT/RW administrators, often determined beneficiaries. This program establishes six criteria for beneficiaries. This is done so that the reach of the program targets vulnerable and disaster-affected groups.

*The second* step taken by the consortium is the participatory selection of beneficiaries. From the initial data collected, the ranking was carried out jointly and involved community leaders, village government, data team, BUMDes, and community assistants such as village development cadres and village assistants, to the PKK and Village Posyandu teams. One of the effects of this inclusiveness scheme is that 69 percent of the beneficiaries are women.

*Third*, the consortium ensures gender equality. The program gives priority to female beneficiaries, families who have or are caring for the elderly, orphans, and PMI families (wives or children who are of productive age). *Fourth*, choose a trainer or tutor with a gender perspective. Certainly, the selected resource persons, trainers, or facilitators do not have gender constraints. Both organizational and personal background.

From the NGO group, this program collaborates with a network of women small entrepreneurs who have so far focused on strengthening women's economies and campaigning for gender equality. Meanwhile, from government elements, the program prioritizes resource persons or trainers from OPD elements who already have PUG regulations and have programs that do not conflict with Gedsi aspects.

# **ANOTHER SAILING STORM AND ATTEMPT TO SET COURSE**

**W**hile the program was running, several challenges arose. This situation is like a storm that often appears on every voyage. The ADBMI Consortium identified some of these challenges in several parts.

## **THE INTERVENTION OF THE REGIONAL HEAD PERSONNEL**

THIS occurs in the determination of beneficiaries. The intervention was in the form of a desire to include a certain name as a beneficiary, asking for an even distribution of the number of beneficiaries in each hamlet, and changing beneficiaries. Even the unscrupulous regional head threatened to give up if there was a protest by the residents because the name he proposed was not designated as the beneficiary.

Against this kind of storm, ADBMI conducted discussions and discussions by expanding participation involving the village government, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, Pokmas, and village women leaders.

## **IMAGE 'THERE IS DATA COLLECTION MEANS THERE IS ASSISTANCE'**

THIS is inherent in the community because of the many socio-economic assistance programs from the government. So that every citizen data collection, including population censuses and voter verification, is assumed to be data on beneficiaries. In this case, the program emphasizes assessors not make promises and not use certain strings of words that refer to hopes or opportunities to get help. In addition, the data collection was carried out by a team that had female members.

## **THE IMAGE OF NGOs IS RHETORIC**

THERE are signs of the growth of local Non-Governmental Organizations (NGOs) that tend to 'disturb' the government with intimidating activities, provoking the public, and giving the impression of being project-oriented. The ADBMI and ADBMI consortium dismissed this issue through program socialization in stages to the village, sub-district, district, and provincial governments.

In addition, ADBMI also takes a personal approach to village government officials through direct visits. In addition, each activity implementation is supported by training tools such as modules and adequate infrastructure. Including elements of credible trainers from universities and practitioners or professionals.

Furthermore, the steps taken are to provide space for the village government and sub-district government to attend to every activity carried out. In this case, the program hopes to build integration of programs and activities, including giving the government space to socialize their good programs.

## **SPECIAL TREATMENT FOR DISABILITIES, GENDER, AND VULNERABLE GROUPS**

ADBMI views people with disabilities, women, and vulnerable groups as groups that tend to be passive or surrender to their civil rights in government. For this reason, the ADBMI and ADBMI Consortium hope that the village government will activate special deliberations for women, children, and the elderly as part of village development planning.

In providing public services, the village administration should renovate several parts of the village office in the form of disability-friendly access, public service facilities such as service counters and desks, and create special rooms for babies and breastfeeding mothers. ADBMI also encourages village budgeting in favor of groups with special needs. This budget alignment can be realized in the form of productive economic training programs, the provision of hearing aids, mobility aids, and visual aids which in the regulations may be budgeted for, both budget allocations originating from the APBN and APBD.

Not only the village government but other care groups are also encouraged to help advocate for vulnerable and special needs groups. Because they don't just expect donations but equal skills and positions. To support the achievement of this, the ADBMI and ADBMI Consortium have supporting activities in this program.

*First*, training facilitators for community champions by providing training in facilitation skills, including for women and persons with disabilities. The *second* is to become ADBMI's partner in developing local products, where ADBMI through the Bumi Raya Cooperative (philanthropic institution) is ready to accommodate and market SME or IKM products. *Third*, ADBMI opens opportunities to partner with BUMDes in waste management, through the Bintang Sejahtera Waste

Management Company. *Fourth*, training on processing waste (circular economy) into economic goods, and other forms of products. *Fifth*, management training and financial applications for BUMDes. *Sixth*, replication of learning between programs and between regions that have been implemented by ADBMI.



# THE EMERGENCE OF CHILD PROTECTION ISSUES DURING PROGRAM IMPLEMENTATION

**A**part from storms during shipping, ADBMI also found several child issues which were photographed during program implementation.

## CHILD LABOR

HUNDREDS of children who are still in school are involved in work in the agricultural and tobacco processing sectors. We found this in the three assisted villages. There was an education about the dangers of working in tobacco and children's rights, but unfortunately, this education was sponsored by tobacco companies.

On the other hand, parents and children still insist on employing children as part of teaching life skills. This shows that the knowledge of parents in the three assisted villages is still low about children's rights.

## CHILD CARE

SOME PMI children are cared for by grandmothers or other relatives. This results in a lack of attention to children's rights such as

the right to life and the right to a proper education. This condition often occurs, especially in children who are entrusted with family members who have low education or are elderly.

Child care with the next of kin also cannot guarantee that children will be free from threats of violence or harassment. This condition is very common in PMI families and can have an impact both on parenting styles and on the vulnerability of the 'broken family effect' on children.

### **EARLY-AGE MARRIAGE**

EARLY marriage is one of the causes of dropping out of school. Because after marriage, children tend to be embarrassed to go back to school. Sometimes some schools or madrasahs expel the child as a student. Early marriage is also one of the causes of becoming PMI. Early marriage is also vulnerable to reproductive health problems and divorce.

### **ADMINISTRATIVE STATUS**

NOT a few PMI women return home with children from the countries where they work. Because the status of the child's parents is kept secret, they are usually reluctant to take care of the child's administrative documents. The impact is that many children are insecure, behave differently, and are sometimes reluctant to continue school.

### **CHILD SEX WORKER**

CHILD sex workers in the three villages assisted by the program are still in the form of allegations related to their potential. This is based on the exploitation of children from other areas and even outside the area who are employed in nightclubs, karaoke, and other

night entertainment venues.

On that basis, ADBMI encourages policymakers to take action in overcoming child problems that are still rife in the three program villages. *First*, the village government must make regulations regarding the prevention of early marriage or marriage maturation.

In this case, the district government needs to be more proactive in assisting the village government. Likewise with other care groups. Early marriage prevention programs already exist at the district level, but their implementation is often hampered by customary laws and customs. Therefore a prevention approach needed that is more comprehensive and involves all levels of society, especially in indigenous and tribal peoples.

*Second*, the role of the Village Children Observation Agency (LPAD) must be strengthened. LPADs in the three villages assisted by the program have been formed. Therefore ADBMI encourages the village government to strengthen its role in carrying out campaigns, data collection, monitoring, and advocacy for children. *Third*, giving awareness to the child's family. Education for families who allow or even exploit children as workers are important to do. This can be done through the involvement of traditional leaders, religious leaders, and community leaders.

*Fourth*, the villages around the three assisted villages can synergize with each other. One of them is by making joint circulars, joint decisions between village heads, one of which is about limiting or preventing child labor in tourist areas.

This is possible because regulations for it are very supportive. With the establishment of the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD), shared duties and responsibilities will also be developed. Thus, the village government also does not only focus on aspects of physical development but also the development of the human resources of the

community.

*Fifth*, the district government is expected to conduct outreach to the villages in the assistance area, make written appeals in tourism areas, appeal through schools, through religious activities, and routinely educate parents.

FIFTH PART  
CHAPTER FIVE

**TO  
THE  
NEW PORT**



# **SWEET FRUIT FROM THE TREE OF KINDNESS**

**W**hile the program was running, ADBMI gained a lot of new knowledge and experience. These are good lessons that have a significant long-term impact, both for this project and for ADBMI as the organizing partner. A number of these lessons are none other than the essence of program implementation. Sweet fruit from the trees of goodness.

## **GENERATING CONFIDENCE VILLAGE GOVERNMENT PROVIDING POLICY SUPPORT**

From the start of the program, ADBMI has intensively coordinated with the village head, village officials, and the village consultative body (BPD). This was done to communicate the program, and explain the position of the NGO, program objectives, outputs, and benefits for the village government.

Through effective coordination and communication, the village government feels valued. This condition results in access to the community so that it does not raise questions or problems.

Also in this effort, the village government actively helps communicate the program with regional heads, and BUMDes officials, and recommends the best people in their village to be involved in the program. In addition, Pemdes openly provides access to the use of facilities in the village such as meeting rooms, communication and presentation tools, and facilitates invitations.

### **RAISING AWARENESS OF THE YOUNG GENERATION ABOUT THE IMPORTANCE OF DISASTER RISK MANAGEMENT**

THE younger generation or millennials know the history of disasters in their village. Previously, village youth tended to be indifferent to potential disasters because of the limited village-scale disaster narratives. For example, in Lepak Village, East Sakra District, the younger generation only knows about the occasional earthquake and tidal flood. None of their knowledge of the history of the disaster.

Very little or no one even knows about the occurrence of an earthquake accompanied by a tsunami around the 1970s in Lombok, or the eruption of Mount Samalas. As a result of this, disasters are understood as God's destiny without thinking about disaster adaptation and mitigation to reduce disaster risk.

Furthermore, the millennial generation has begun to awaken their awareness to know about disaster risk management. Then after this awareness emerged, an understanding of disasters caused by human behavior such as the use of pesticides, the use plastics, and waste management was built which had an impact on decreasing environmental quality.

From this, youth awareness emerged through BUMDes to manage waste as a business option. In addition to reducing the environmental impact, it also brings economic benefits.



## **BELIEVE IN LOCAL POTENTIAL**

AT the beginning of the ADBMI starting this program, it was found that BUMDes management was in a demotivated state. This was born out of self-doubt because they did not receive support from the village head. The administrators who were not active even disappeared and the business was run out of business.

ADBMI then came and gave them new enthusiasm. Giving motivation is done by making them aware of the potential they have. With new enthusiasm and high self-confidence, ADBMI assisted them in recruiting local youths whose capacity and abilities were doubtful because they were considered very low.

After going through several pieces of training and capacity building, their potential can be raised and maximized. Their mentality is honed, and their ability to speak in public improves significantly. Of course, self-confidence also rose.

The sweet fruit that can be picked from this tree of goodness is 'trust'. The trust we give them to do new things within the framework of freedom of thought and innovation brings significant changes to them.

This process not only generates the potential for continued program impact, but also new Human Resources (HR) for ADBMI. Where so far we do not have enough facilitators who can be utilized in empowerment activities.

## **ENCOURAGING LOCAL CHAMPION ENGAGEMENT**

ANOTHER sweet fruit that we can reap from this program is the success in encouraging the involvement of local champions as spearheads of the program. Where local champions who are members of the complaint management team are led by BUMDes and consist of regional heads and community leaders.

This team proved to be effective in suppressing and neutralizing potential complaints and protests that arose as a result of the determination of beneficiary names. The complaint team was appointed and confirmed by a decree (SK) of the village head.

### **HEALTHY INTERNET**

THE internet network supports BUMDes business development and beneficiary families. Currently, the ownership of Android-based devices reaches almost all families. On the one hand, gadgets harm users. Where gadgets cause a reduction in direct social interaction and also encourage inflation due to consumptive patterns of buying the latest Android devices, as well as internet network pulses that are needed every day.

But on the other hand, devices can also be a supporting capital for sales in the form of product marketing and buying and selling transactions. This project has succeeded in raising the awareness of beneficiary families and BUMDes to utilize the village internet and their devices for business purposes. So that the previous negative impact can be reversed into a positive impact.

# RBA'S BLESSING FOR POLICY STAKEHOLDERS

**A**ny collaboration will certainly bring benefits to both parties. There are at least five important things that the Responsible Business Alliance (RBA) provides to the village government as the main stakeholder at the grassroots.

*First*, the program assists villages in providing up-to-date data on vulnerable groups and business actor data in the village government database. When this data is needed in preparing village development plans. *Second*, this program strengthens village and district relations. The activities carried out can facilitate the relationship between the village government and the district government, so that some programs that are relevant to the relevant agencies make it possible to be implemented in the three program villages in the following fiscal year. Including giving more attention to socio-economic problems that exist in program villages. Such as the problem of children, stunting, and MSME actors in the Lombok area.

*Third*, the program serves as a socialization space for village and district governments. In this case, the two agencies also took advantage of the meetings and training held by the program to

socialize local government development plans and policies. Both social, economic, and political. *Fourth*, the program bridges relationships with banking and professional groups. Where in several activities carried out, the program presents parties as resource persons and facilitates the collaboration of both parties.

*Fifth*, the program strengthens the implementation of village administration tasks. In this case empowering marginalized or vulnerable communities affected by disasters, especially due to the Covid-19 pandemic. Because the task of mitigating the impact of Covid-19 is mostly borne by the village government. The present program empowers and builds public trust to rise from the crisis caused by the pandemic through many empowerment and advocacy activities.

# MAP TO NEW HARBOR

**N**ow the replica of Noah's ark has arrived at its destination. Beneficiaries, both directly and indirectly affected, have felt the impact of the presence of the economic recovery program carried out by the ADBMI consortium. But the journey is still long. After being able to get out of the economic downturn due to the tsunami pandemic, the beneficiaries need assistance with the continuation of the program which we describe as a new port. So we compiled the map nodes of the sustainable assistance journey. It is in the form of a series of recommendation notes.

The first recommendation is updating and improving the database of beneficiaries, the completeness of the content, and the variety of formats and presentations. The data is then disseminated to strategic partners, namely the relevant OPDs which have shown their attention and commitment to supporting the sustainability of this program against the beneficiary database. The relevant OPDs are Bappeda, the PMD Service, and the Cooperative and UKM Office, which also includes the village government.

Furthermore, BUMDes are expected to be able to maintain the

relationships that have been built with banks, universities, NGOs, and professional groups (business actors) as business and non-business partners in developing BUMDes. This is a BUMDes development strategy according to BUMDes regulations. The next recommendation is to encourage the village government to run a technical and management training program for 100 beneficiaries.

In addition, we also hope that the PMD Service, the Cooperative and UMKM Office, and other related OPDs will make beneficiaries the target of guidance and give them priority attention. This is important considering that the Lombok region has potential as well as challenges that will have a broad impact on regional development issues if not handled properly.

ADBMI also encourages ongoing assistance from partner universities through various academic activities such as thematic KKN and ongoing research. After that, followed by efforts to preserve the collaboration that has been built, such as waste management with the Bintang Sejahtera waste bank, beneficiary production and marketing cooperation with the Bumi Raya Cooperative, and efforts to save the environment to support disaster risk reduction management.

Preservation and development of IT-based management and finance in BUMDes as a BUMDes business development tool is the next part of the recommendations.

Lastly, there needs to be the involvement of the government and cellular providers to push for a cheap or even free internet policy. So that beneficiary families can optimize the use of the internet to increase their economy.



# TSUNAMI PANDEMI DAN REPLIKA BAHTERA NUH UNTUK PMI

---

Buku 'Tsunami Pandemi dan Replika Bahtera Nuh untuk Pekerja Migran Indonesia' ini disarikan dari ratusan dialog, puluhan seri pertemuan, pelatihan, dan seminar yang diselenggarakan ADBMI dalam sebuah proyek penanganan dampak ekonomi Covid-19 di tiga desa Kantong PMI di Kabupaten Lombok Timur. Proyek yang dilaksanakan selama 12 bulan ini merupakan upaya untuk memastikan kelompok pekerja migran dapat selamat dari hantaman tsunami ekonomi akibat pandemi. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapasitas BUMDes dan keluarga PMI.

---

